

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI
DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) KUNCUP MEKAR
DESA RIJANG PANUA, KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

NURFADILA

NIM: 2220203862202015

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI
DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) KUNCUP MEKAR
DESA RIJANG PANUA, KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**NURFADILA
NIM. 2220203862202015**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam
Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang
Panua, Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nurfadila

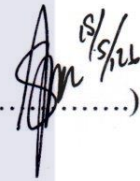
NIM : 2220203862202015

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-3497/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Ira Sahara, M. Ak. (.....)

NIP : 19901220 201903 2016

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mundalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam
Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang
Panua, Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Nurfadila

NIM : 2220203862202015

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-3497/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 03 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

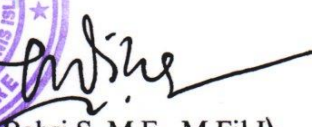
Ira Sahara, S.E., M.Ak.	(Ketua)	()
Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.	(Anggota)	()
Ismayanti, S.E., M.M.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



()
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

NIP. 19781101 200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Teristimewa penulis persembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhassir dan Ibunda Nurniati yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, semangat, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak tercinta, Muhammad Asri serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

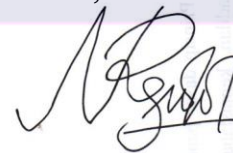
Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M. Ak., CTA., ACPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Rini Purnamasari, S.E., M.Ak. Dan Ibu Ismayanti, S.E., M.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Administasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan dan arahannya.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar beserta jajaran pegawai BUMDes Kuncup Mekar yang telah memberikan data yang diperlukan.
10. Sepupu penulis, Nurul dan Reski, sahabat penulis, Tiara dan Novi, serta seperjuangan mahasiswa Akuntansi Syariah angkatan 2022 yang telah berjuang bersama-sama selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
11. Kepada Jamal's Fams, Lilis, Cinta, Amel, Mindonk, Arfah, Anggun, yang telah menjadi teman berbagi cerita, canda, dan kenangan yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga yang akan selalu dikenang oleh penulis.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tetap kuat dalam melewati setiap proses selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan terus berusaha memberikan yang terbaik sampai berada di titik ini.

Parepare, 18 Mei 2026
20 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis,



Nurfadila
NIM: 2220203862202015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadila
NIM : 2220203862202015
Tempat/Tgl. Lahir : Tellang-tellang Sidrap, 18 Mei 2004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam
Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang
Panua, Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Mei 2026
20 Dzulqa'dah 1446 H

Penulis,



Nurfadila
NIM: 2220203862202015

ABSTRAK

NURFADILA, *Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.* (dibimbing oleh Ira Sahara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar masih menggunakan sistem pencatatan sederhana (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*), yaitu pencatatan yang berfokus pada kas masuk dan kas keluar. Dalam penyusunan laporan keuangan, BUMDes Kuncup Mekar telah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, serta menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Namun, proses pencatatan belum dilakukan melalui tahapan akuntansi yang lengkap seperti jurnal umum dan buku besar. Kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan pemahaman pengurus terhadap akuntansi dan penerapan sistem pencatatan yang belum optimal. Solusi yang dilakukan yaitu melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan.

Novelty dalam penelitian ini terletak pada implementasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar yang telah menggunakan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, namun masih menerapkan sistem pencatatan sederhana (*single entry*). Penelitian ini tidak hanya membahas penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mengkaji proses implementasi sistem pencatatan, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan, serta pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan BUMDes secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Implementasi, Sistem Pencatatan Akuntansi, Laporan Keuangan, BUMDes*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	17
1. Implementasi	17
2. Akuntansi.....	18
3. Sistem Pencatatan Akuntansi	24
4. Laporan Keuangan.....	32
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	37
C. Kerangka Konseptual	52
D. Kerangka Pikir.....	55

BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
C. Fokus Penelitian	59
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	60
F. Uji Keabsahan Data	62
G. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	66
B. Hasil Penelitian.....	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	97
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	VIII
BIODATA PENULIS	XXVIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
4.1	Laporan Laba/Rugi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar	74
4.2	Laporan Perubahan Modal/Ekuitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar	75
4.3	Neraca Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar	75
4.4	Laporan Arus Kas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar	76

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
2.1	Bagan Kerangka Pikir	56
4.1	Struktur Organisasi BUMDes Kuncup Mekar	68



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1	Pedoman wawancara	IX
2	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XII
3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	XIII
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XIV
5	Surat Keterangan Izin Penelitian	XV
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XVI
7	Surat Keterangan Wawancara	XVII
8	Dokumentasi	XXII
9	Laporan Laba/Rugi BUMDes Kuncup Mekar	XXIV
10	Laporan Perubahan Modal Ekuitas BUMDes Kuncup Mekar	XXV
11	Neraca BUMDes Kuncup Mekar	XXVI
12	Laporan Arus Kas BUMDes Kuncup Mekar	XXVII
13	Biodata Penulis	XXVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ / يَ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas

نُو	Kasrah dan Wau	U	u dan garis di atas
-----	-------------------	---	------------------------

Contoh:

مات	: māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah

(يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta ’murūna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ’umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
بدون	= بدون
صلعم	= صلعم
ط	= طبعة
بدون ناشر	= بدون ناشر
إلى آخرها / إلى آخره	= إلى آخرها / إلى آخره
جزء	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi tidak hanya sebatas kegiatan pencatatan transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai “bahasa bisnis” karena melalui laporan keuangan, kondisi dan kinerja keuangan suatu entitas dapat dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, akuntansi memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan ekonomi, evaluasi kinerja, serta sebagai sarana akuntabilitas organisasi.¹

Sasaran utama dari akuntansi adalah aktivitas ekonomi dan keuangan yang terjadi dalam suatu entitas. Aktivitas ini kemudian diolah melalui proses atau siklus akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan sebagai output utama. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari pengidentifikasian dan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi secara umum mencakup: menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal umum, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan, membuat jurnal penyesuaian dan mempostingnya, menyusun neraca saldo yang disesuaikan, menyiapkan lembar kerja, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan.²

¹ Helmi Wahyudi et al., “Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 5, no. 3 (2024).

² Slamet Sugiri and Bogat Agus Riyono, *AKUNTANSI Pengantar 1* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2007).

Dari beberapa tahapan proses atau siklus akuntansi tersebut maka organisasi atau perusahaan dapat menghasilkan informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pokok yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Berdasarkan dua laporan tersebut selanjutnya dapat dibuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun sistem pencatatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan. Sistem pencatatan akutansinya yaitu sistem pembukuan tunggal (*single entry*) dan sistem pembukuan berpasangan (*double entry*). Selain itu, dalam praktik akuntansi dikenal dua basis pencatatan, yakni basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Pada basis kas, pencatatan dilakukan saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Sebaliknya, basis akrual mencatat transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Basis akrual dinilai lebih relevan karena mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dan menjadi standar dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.³

Dengan demikian, akuntansi sebagai suatu proses menghasilkan informasi keuangan tidak dapat dilakukan secara subjektif sesuai selera individu, melainkan harus mengikuti standar dan prinsip yang telah disepakati. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan. Kepatuhan pada standar ini penting untuk menjamin keterbandingan, transparansi, serta akuntabilitas laporan keuangan bagi para pengguna informasi.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya melalui pengelolaan

³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

potensi desa. Salah satu instrumen penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset desa, menyediakan jasa dan usaha ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat. Namun tentu saja keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh potensi usaha dan modal yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara profesional dan transparan.

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 87 UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Dengan demikian, pendirian BUMDes merupakan manifestasi dari kemandirian ekonomi desa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha kolektif yang berbasis potensi lokal.

Implementasi sistem pencatatan akuntansi merupakan unsur fundamental dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Tanpa sistem pencatatan yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan bisa tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, mengaburkan akuntabilitas, dan mengurangi kepercayaan masyarakat serta pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa. Prinsip-prinsip akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan harus dipenuhi agar laporan keuangan BUMDes memenuhi standar keuangan yang berlaku dan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pengurus, masyarakat, maupun instansi pengawas.

⁴ Allan Fatchan Gani Wardana, "Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 2 (2021): 63–74.

Sejalan dengan perkembangan regulasi, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan lengkap yang mencakup lima komponen:⁵ laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Regulator berharap bahwa dengan adanya peraturan ini, BUMDes dapat melakukan penyajian laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes sudah mampu menerapkan keseluruhan ketentuan tersebut. Banyak BUMDes yang masih terbatas dalam menyusun hanya sebagian laporan (misalnya hanya neraca dan laporan laba rugi), atau penyajian laporan tidak lengkap dan kurang sesuai standar.⁶

Penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penyajian laporan keuangan BUMDes sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perkembangan usaha, seperti omzet, laba/rugi, dan struktur permodalan.⁷ Laporan ini memudahkan pengelola dalam mengembangkan usaha, memantau penggunaan dana, serta menilai efektivitas kegiatan yang dijalankan. Laporan keuangan juga menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja usaha, dan arus kas yang

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022)* (Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kemendesa PDTT, 2022), diakses melalui <https://jdih.kemendesa.go.id/web/regulations/read/panduan-penyusunan-laporan-keuangan-badan-usaha-milik-desa-menteri-desa-pembangunan-daerah-tertinggal-dan-transmigrasi-republik-indonesia-136-2022>

⁶ La Ode Abdul Rachman dan S. Wahyuni, "Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)* 5, no. 1 (2020): 39–52.

⁷ Angelina Trimurti Rambu Ana and Linda Lomi Ga, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk)," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 62–72.

bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada masyarakat dan pemerintah atas pemanfaatan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.⁸ Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi menjadi dasar penting dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang baik.

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa. BUMDes memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha yang dikelola secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, diperlukan sistem pencatatan akuntansi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, andal, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Namun, pada praktiknya, masih banyak BUMDes yang menghadapi kendala dalam penerapan sistem pencatatan akuntansi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap prosedur akuntansi, serta belum adanya standar pencatatan yang baku. Pengurus BUMDes dalam melakukan kegiatan pencatatan keuangan umumnya masih menggunakan metode pencatatan yang sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, yang mengakibatkan laporan keuangan yang disusun tidak lengkap, kurang detail, dan belum mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan kinerja BUMDes, sehingga terkadang

⁸ Desti Fitriani, Amirul Shah Md Shahbudin, and Elvia R. Shauki, "Exploring BUMDES Accountability: Balancing Expectations and Reality," *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).

menimbulkan keraguan di masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BUMDes Kuncup Mekar didirikan pada tahun 2017 yang berlokasi di Jalan Poros Kulo, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan salah satu BUMDes yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi desa. Dalam praktiknya, penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar masih dilakukan secara sederhana. Berdasarkan kondisi awal di lapangan, laporan keuangan yang disajikan pada saat itu belum mencakup seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Penyajian laporan keuangan lebih berfokus pada pencatatan kas masuk dan kas keluar yang disusun dalam bentuk buku kas sederhana. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya mampu menggambarkan posisi keuangan dan kinerja BUMDes secara menyeluruh.

BUMDes Kuncup Mekar pada awalnya masih menerapkan sistem pencatatan keuangan secara manual, yaitu dengan mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran ke dalam buku pencatatan. Sistem tersebut digunakan sejak BUMDes berdiri dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan akan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, sejak tahun 2024 BUMDes Kuncup Mekar mulai menggunakan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penggunaan aplikasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, serta kualitas informasi keuangan yang dihasilkan sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Dilihat dari basis akuntansi yang digunakan, BUMDes Kuncup Mekar dalam melakukan pencatatan transaksi keuangannya masih menggunakan basis kas (*cash basis*). Artinya, transaksi keuangan hanya dicatat pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran kas, tanpa memperhatikan periode terjadinya hak

dan kewajiban. Penggunaan basis kas ini menyebabkan pendapatan dan beban belum diakui secara tepat waktu sesuai periode akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi ekonomi BUMDes yang sebenarnya. Padahal, dalam ketentuan standar akuntansi dan regulasi pelaporan keuangan BUMDes, basis akrual dinilai lebih tepat karena mampu memberikan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan.

Dari segi struktur organisasi, BUMDes Kuncup Mekar memiliki jumlah pengurus sebanyak 10 orang, yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, serta pengelola unit usaha. Meskipun jumlah pengurus tergolong cukup, namun pembagian tugas khususnya di bidang pencatatan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sistem pencatatan akuntansi yang masih sederhana dan belum sesuai dengan standar yang berlaku.

BUMDes Kuncup Mekar menjalankan beberapa jenis usaha, antara lain usaha perdagangan dan jasa yang meliputi pangkalan gas elpiji 3 kg, unit simpan pinjam, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), serta jasa penagihan listrik. Beragamnya unit usaha yang dikelola seharusnya diikuti dengan sistem pencatatan akuntansi yang memadai agar setiap unit usaha dapat dipantau kinerja dan kontribusinya terhadap pendapatan BUMDes. Namun, keterbatasan sistem pencatatan menyebabkan informasi keuangan tiap unit usaha belum dapat disajikan secara terpisah dan terperinci.

Dari sisi permodalan, BUMDes Kuncup Mekar memperoleh anggaran dari dana desa dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020, BUMDes Kuncup Mekar memperoleh anggaran sebesar Rp44.476.200, kemudian pada tahun 2021 anggaran meningkat menjadi Rp76.051.506, dan pada tahun 2022 anggaran yang diterima sebesar Rp32.259.000. Sementara itu, pada tahun 2023, 2024, dan 2025, BUMDes Kuncup Mekar tidak lagi menerima anggaran tambahan dari dana desa. Tidak diterimanya anggaran pada tahun-tahun tersebut

mengharuskan BUMDes untuk mengelola dan mengoptimalkan dana yang telah ada secara mandiri. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya sistem pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang baik, karena laporan keuangan menjadi dasar utama dalam menilai keberlanjutan usaha, efisiensi penggunaan dana, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi usaha yang cukup baik, hasil observasi awal menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar masih sangat sederhana. Proses pencatatan hanya berfokus pada kas masuk dan kas keluar tanpa menggunakan jurnal umum, buku besar, maupun laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, keterbatasan pemahaman pengurus terhadap prinsip dan prosedur akuntansi berdampak pada rendahnya kualitas informasi keuangan yang disajikan, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi keuangan secara akurat dan menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sistem, basis akuntansi, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini memunculkan sejumlah pertanyaan pokok yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi?
3. Apa solusi dalam menghadapi kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi?
4. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkannya dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menerapkan teori akuntansi ke dalam praktik nyata di lapangan, khususnya pada pengelolaan keuangan BUMDes.

b. Bagi Pengelola BUMDes

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal bagi pengelola BUMDes dalam melihat sejauh mana sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan sudah sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, khususnya Permendesa PD TT Nomor 136 Tahun 2022.

c. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini memberi manfaat berupa peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan BUMDes, baik sebagai pengguna layanan maupun sebagai mitra usaha, sehingga memperkuat perputaran ekonomi lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan bersumber dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, maupun karya ilmiah lainnya.⁹ Kajian terhadap penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan landasan empiris, sekaligus menjadi pembandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelusuran penelitian terdahulu membantu peneliti dalam menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), memperkuat argumentasi teoritis, kajian literatur, serta memperkaya pemahaman terhadap topik yang dikaji.¹⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan referensi dan pembandingan, guna memperkuat dasar teoritis serta mendukung analisis terhadap implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar, Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Efendi pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Barokah di Desa Pekantua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDes Harapan Barokah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dalam proses pencatatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan

⁹ Haura Hanifah, “Landasan Teori Penelitian Relevan,” *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. April (2025): 391–404.

¹⁰ Sri Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Tesis* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

bahwa BUMDes Harapan Barokah belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi yang berterima umum. Pencatatan keuangan masih sederhana dan belum sesuai dengan SAK ETAP, terlihat dari belum adanya pemisahan antara aktiva lancar dan tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang, serta tidak tersusunnya laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pencatatan yang digunakan masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum memberikan gambaran keuangan yang akurat dan komprehensif.¹¹

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan BUMDes dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada penerapan akuntansi keuangan secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh M. Efendi di BUMDes Harapan Barokah di Desa Pekantua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adelima Hutabaalian, Hendrik ES Samosir, dan Ardin Dolok Saribu pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maduma Desa Palipi Kabupaten Samosir”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengkaji sejauh mana penerapan akuntansi yang dilaksanakan

¹¹ M. Efendi, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Barokah Di Desa Pekantua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir” (Universitas Islam Riau, 2020).

oleh BUMDes Maduma telah sejalan dengan standar akuntansi desa dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Maduma telah melaksanakan proses pencatatan keuangan, namun penerapannya belum dilakukan secara sistematis dan belum mengacu pada standar akuntansi desa maupun prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum menggunakan sistem pencatatan yang terintegrasi, sehingga penyajian laporan keuangan belum mampu menggambarkan kondisi keuangan secara utuh. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang akuntansi, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis terkait penerapan sistem akuntansi, serta lemahnya pengawasan internal dalam proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan BUMDes.¹²

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas implementasi sistem pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BUMDes dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada pelatihan dan kebijakan pengawasan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Adelima Hutabaalian, Hendrik ES Samosir, dan Ardin Dolok Saribu di BUMDes Maduma Desa Palipi Kabupaten Samosir, sedangkan penelitian

¹² Adelima Hutabaalian, Hendrik ES Samosir, and Ardin Dolok Saribu, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maduma Desa Palipi Kabupaten Samosir," *Jurnal Minfo Polgan* 13, no. 2 (2024): 1316–30.

yang dilakukan penulis di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azlansyah pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada BUMDes Danau Indah dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pada BUMDes Danau Indah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Proses pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan bersifat sederhana, hanya terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa adanya pemisahan yang sistematis antarpos keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan juga belum lengkap karena tidak mencakup laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam standar akuntansi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi dan kinerja keuangan BUMDes, serta masih memerlukan pembenahan dalam hal pemahaman akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan penerapan standar akuntansi secara konsisten.¹³

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan sistem pencatatan akuntansi di BUMDes dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian dengan prinsip akuntansi umum seperti ketidaksesuaian pencatatan terhadap SAK

¹³ Azlansyah, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

ETAP, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Azlansyah di BUMDes Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Khusnul Khotimah pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa BUMDes Beringin Jaya Kecamatan Enok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi keuangan pada BUMDes Beringin Jaya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada BUMDes Beringin Jaya belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sistem pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual dan sederhana dengan menggunakan dasar kas, di mana transaksi hanya dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan tanpa memperhatikan prinsip periodisasi. Selain itu, BUMDes belum menggunakan jurnal umum maupun buku besar sebagai alat bantu pencatatan transaksi secara sistematis. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mampu menggambarkan posisi keuangan dan kinerja BUMDes secara menyeluruh dan akurat. Kurangnya pemahaman pengelola terhadap prosedur akuntansi yang benar serta ketiadaan sistem pencatatan baku menjadi faktor utama yang menghambat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi desa.¹⁴

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan sistem pencatatan akuntansi terhadap

¹⁴ Umami Khusnul Khotimah, “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa BUMDes Beringin Jaya Kecamatan Enok” (Universitas Islam Riau, 2021).

laporan keuangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian dengan prinsip akuntansi umum seperti ketidaksesuaian pencatatan terhadap SAK ETAP, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Umami Khusnul Khotimah di BUMDes Beringin Jaya Kecamatan Enok, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yayang Putri pada tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hikmah Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada BUMDes Al-Hikmah dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi pada BUMDes Al-Hikmah masih tergolong sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Meskipun BUMDes telah melakukan pencatatan transaksi keuangan melalui pembuatan jurnal dan buku besar, namun proses penyusunan laporan keuangan masih belum lengkap dan tidak mencakup seluruh komponen utama sebagaimana yang diatur dalam standar akuntansi. BUMDes belum menyusun laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang berfungsi untuk menjelaskan rincian dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan masih terbatas pada tahap pencatatan dan belum mencapai tahap penyajian laporan keuangan secara komprehensif. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi serta belum adanya pedoman pencatatan

yang baku menjadi faktor utama yang menghambat penerapan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku.¹⁵

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan sistem pencatatan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian format laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi yang menjadi objek penelitian, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Yayang Putri di BUMDes Al-Hikmah Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap.

B. Tinjauan Teori

1. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Secara umum, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian, implementasi dapat diartikan sebagai proses nyata dalam menerjemahkan rencana atau kebijakan ke dalam tindakan konkret.¹⁶ Karena pada hakikatnya setiap rencana mempunyai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, istilah implementasi lantas diarahkan pada rangkaian tindakan yang dilakukan untuk

¹⁵ Yayang Putri, "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hikmah Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis" (Universitas Islam Riau, 2022).

¹⁶ Yuliah Elih, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir* 30, no. 2 (2020): 129–53.

melaksanakan dan merealisasikan program yang telah dirancang agar tujuan tersebut tercapai.

Menurut Nurdin Usman implementasi didefinisikan sebagai “aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.¹⁷ Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya menyinggung soal “melakukan sesuatu”, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, struktur, mekanisme dan konsistensi dalam pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif.

Sementara itu, Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa implementasi merujuk pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁸ Dengan demikian, implementasi menjadi jembatan antara “apa yang direncanakan” dengan “apa yang akhirnya dilakukan” oleh pihak pelaksana.

2. Akuntansi

a. Definisi Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Akuntansi adalah suatu teori dan praktek berupa proses yang diawali dari; pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan seluruh transaksi perusahaan yang bernilai secara finansial, meliputi: pertanggungjawaban, prinsip, standar aturan, kelaziman beserta semua aktivitas; perihal yang ada kaitannya dengan para akuntan; seni pencatatan, penggolongan, dan

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Bandung: CV Sinar Baru, 2002).

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

serangkaian proses akuntansi keuangan serta penganalisaan dari kegiatan transaksi terhadap suatu kesatuan dalam ekonomi.¹⁹

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang digunakan sebagai alat pengukuran untuk mengukur sebuah pertanggungjawaban. Akuntansi sendiri lahir dalam lingkungan ekonomi kapitalis. Akuntansi digunakan sebagai penyebaran informasi kuantitatif, yang mana informasi tersebut berhubungan dengan angka. Di dalam akuntansi banyak penjabarannya yaitu, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Syariah, Akuntansi Pemerintah, dll. Akuntansi biasa disebut dengan *tool of management* yang artinya akuntansi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan harta dan menjaganya agar proses akumulasi kekayaan dapat berjalan dengan lancar dan penguasaannya tetap dikuasai kapitalis.

Akuntansi merupakan sistem informasi yang melacak operasi bisnisnya untuk menyusun data menjadi laporan dan memberikan temuan-temuannya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan mengendalikan struktur sosial dan ekonomi yang berasal dari kewajiban individu, pemerintah, dan organisasi lain berdasarkan bagaimana sumber daya tersebut digunakan di negara tersebut.²⁰

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²¹ Proses ini bertujuan untuk menyediakan data yang relevan, andal, dan dapat dipercaya guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Definisi AAA menekankan bahwa akuntansi

¹⁹ Radiansyah Adrian et al., *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Di Berbagai Sektor* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁰ Elvira Jessica Gita, Suheriyatmono, and Yuliana, *Teori Akuntansi* (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025).

²¹ Darsana I Made et al., *Pengantar Akuntansi* (Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023).

tidak hanya sekedar pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai *stakeholders*, seperti investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah.

Sementara itu, Ikatan Sarjana Bisnis Indonesia (ISBI) memberikan definisi akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini mencerminkan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. ISBI menegaskan bahwa akuntansi berfungsi sebagai alat pengendalian (*control tool*), alat pertanggungjawaban (*accountability tool*), dan sarana pengambilan keputusan (*decision making tool*). Dalam konteks bisnis di Indonesia, akuntansi juga berperan dalam memenuhi kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan.²²

Meskipun AAA dan ISBI memiliki penekanan yang sedikit berbeda, keduanya sepakat bahwa akuntansi adalah proses penyediaan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. AAA lebih fokus pada proses teknis akuntansi, seperti pengukuran dan pelaporan, sedangkan ISBI menitikberatkan pada aspek fungsional dan regulasi dalam konteks bisnis Indonesia. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa akuntansi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung keberlanjutan suatu bisnis.

Akuntansi sangat penting bagi individu, bisnis, perusahaan, dan UMKM selain sektor negara. Mencatat, mengkategorikan, meringkas, melaporkan, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan adalah tujuan utama akuntansi, yang berfungsi sebagai pondasi fundamental untuk membuat

²² Faiz Zamzami, Nabella Duta Nusa, and Ihda Arifin Faiz, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).

keputusan. Akuntansi dapat dipisahkan menjadi dua kategori: akuntansi sebagai pelaksana penerapan aturan akuntansi untuk pembuatan laporan keuangan dan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan profesional atau keahlian yang menggabungkan bidang-bidang keilmuan.

Definisi-definisi di atas menjelaskan akuntansi sebagai suatu "seni" atau suatu "aktivitas jasa" atau suatu "sistem informasi keuangan" yang memproses data-data keuangan suatu organisasi dengan cara pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran serta pelaporan yang berguna untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Konsep Dasar Akuntansi

Konsep dasar akuntansi dapat diikhtisarkan sebagai berikut.²³

1. Pencatatan akuntansi dilakukan terhadap perusahaan sebagai entitas yang terpisah (*separate entity*).

Dalam akuntansi, perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis dianggap sebagai suatu kesatuan usaha (entitas) tersendiri. Artinya, transaksi atau kejadian yang akan dicatat oleh perusahaan adalah transaksi atau kejadian yang dilakukan atau berpengaruh terhadap perusahaan itu saja. Transaksi atau kejadian tersebut dicatat dan dilaporkan dari sudut pandang perusahaan, terpisah dari pihak-pihak lain yang terlibat termasuk pemiliknya. Sebagai suatu entitas terpisah, pada dasarnya, suatu perusahaan akan dilihat dari dua sisi, yaitu kekayaan (aset) yang dimiliki serta sumber pendanaan untuk memperoleh kekayaan (aset) tersebut. Untuk selanjutnya istilah aset digunakan untuk menyebut kekayaan.

Aset dapat terdiri dalam berbagai bentuk, misalnya uang tunai (kas), pabrik, peralatan, atau kendaraan (mobil). Makin besar perusahaan, makin banyak elemen yang membentuk aset. Hal serupa berlaku untuk

²³ Rahardjo Soemarso Slamer, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

sumber pendanaan. Secara garis besar, elemen sumber pendanaan dapat dikelompokkan menjadi utang dan modal. Utang atau sering disebut kewajiban atau liabilitas merupakan sumber pendanaan yang berasal dari kreditur. Contoh sumber pendanaan ini adalah utang yang diperoleh dari bank (utang bank). Makin besar perusahaan, makin banyak elemen yang membentuk kewajiban. Untuk selanjutnya, dalam buku ini, istilah kewajiban dan liabilitas akan digunakan secara bergantian dengan mengacu pada arti yang sama, yaitu menyebutkan sumber pendanaan dari kreditur atau yang bersifat kredit. Istilah utang tetap digunakan tersendiri untuk menjelaskan jenis utang yang spesifik.

Modal merupakan sumber pendanaan yang berasal dari pemilik. Ini merupakan uang atau aset lain yang disetorkan oleh pemilik kepada perusahaan sebagai bukti bahwa ia (mereka) telah ikut dalam kepemilikan perusahaan. Pelaporan modal tergantung pada bentuk badan usaha yang dipilih. Istilah modal sebagai suatu keseluruhan dalam akuntansi sering disebut dengan ekuitas (*equity*). Untuk selanjutnya, dalam buku ini, akan digunakan istilah ekuitas. Istilah modal digunakan jika menyebut modal secara spesifik.

2. Pencatatan akuntansi menggunakan metode pembukuan berganda (*double entry book keeping*) di mana setiap transaksi dalam perusahaan akan dicatat dan dilaporkan melalui dua sisi yang berbeda.

Ada sedikit kekaburan antara pembukuan (*book keeping*) dan akuntansi (*accounting*). Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa keduanya saling berhubungan dan tidak ada pemisahan yang tegas dan diterima secara umum. Pada umumnya pembukuan adalah pencatatan data perusahaan dengan suatu cara tertentu. Akuntansi, lebih luas cakupannya dibandingkan pembukuan. Akuntansi terutama berhubungan dengan perancangan sistem pencatatan, penyusunan laporan berdasarkan data yang telah dicatat dan penafsiran atas laporan-laporan tersebut.

Pekerjaan akuntan pada tingkat permulaan mungkin termasuk pekerjaan pembukuan. Dalam setiap keadaan, akuntan harus mempunyai pengetahuan yang lebih banyak, baik pengetahuan mengenai konsep-konsep akuntansi maupun kemampuan analitisnya dibandingkan dengan seorang pemegang buku.

Konsep pembukuan berganda (*double entry book keeping*) mengandung arti bahwa setiap transaksi atau kejadian dalam perusahaan akan dicatat dari dua sisi berbeda dengan jumlah di satu sisi harus sama dengan jumlah di sisi lain. Setiap transaksi atau kejadian diteliti pengaruhnya terhadap elemen-elemen yang membentuk aset, liabilitas, atau ekuitas. Inti dari pencatatan akuntansi adalah bahwa pengaruh dari setiap transaksi atau kejadian akan dilihat sebagai penambahan atau pengurangan terhadap paling tidak dua elemen dari aset, liabilitas, atau ekuitas. Dengan konsep pembukuan berganda, maka kesamaan dalam persamaan akuntansi akan selalu dapat dipertahankan.

3. Pencatatan akuntansi dilakukan dengan konsep persamaan akuntansi (*accounting equation*).

Sebagai kesatuan usaha terpisah (konsep entitas terpisah) keberadaan perusahaan diwujudkan dalam bentuk posisi keuangan di setiap saat. Posisi keuangan menunjukkan dua sisi terpisah. Sisi pertama melaporkan aset yang dimiliki perusahaan. Sisi ini menunjukkan kekayaan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Sisi yang lain mencerminkan sumber pendanaan dari aset yang bersangkutan. Sumber pendanaan digolongkan menjadi pendanaan dari kreditur (kewajiban atau liabilitas) dan pendanaan dari pemilik (ekuitas). Konsep dasar persamaan akuntansi mendalilkan bahwa jumlah aset akan selalu sama dengan jumlah sumber pendanaan. Melalui pencatatan berganda, setiap transaksi diteliti mengenai pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, atau ekuitas dengan mensyaratkan bahwa persamaan akuntansi harus

selalu dapat dipertahankan. Setiap transaksi selalu dicatat dari dua sudut pandang terpisah.

3. Sistem Pencatatan Akuntansi

a. Pengertian Sistem Pencatatan Akuntansi

Pencatatan akuntansi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghimpun, mencatat, mengelompokkan, serta meringkas seluruh transaksi keuangan suatu entitas atau perusahaan secara terstruktur. Proses ini berperan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan, pemantauan kinerja keuangan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Pencatatan akuntansi meliputi pencatatan aset, liabilitas, modal, pendapatan, dan biaya, yang didukung oleh dokumen pendukung seperti faktur dan kuitansi.²⁴

Sistem pencatatan akuntansi merupakan elemen penting dalam proses penyusunan laporan keuangan suatu entitas, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui sistem ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi dapat dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas secara sistematis agar menghasilkan informasi yang relevan, andal, serta dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan organisasi. Sistem pencatatan akuntansi adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan keuangan secara teratur dan terukur guna menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat.²⁵ Dengan demikian, sistem pencatatan akuntansi bukan hanya sekadar aktivitas administratif, tetapi juga merupakan komponen penting dalam pengendalian internal serta transparansi lembaga keuangan seperti BUMDes.²⁶

²⁴ Subagjo Harry et al., *Konsep Dasar Akuntansi Keuangan* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2025).

²⁵ Febriantoko Jovan, *Sistem Informasi Akuntansi* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024).

²⁶ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Untuk Pemula Dan Orang Awam* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

Sistem pencatatan akuntansi dapat dipahami sebagai prosedur yang disusun secara sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas setiap transaksi keuangan agar dapat diolah menjadi laporan keuangan yang informatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pencatatan akuntansi adalah mekanisme yang mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.²⁷ Pencatatan akuntansi bertujuan untuk menyediakan data keuangan yang akurat dan membantu entitas dalam mengevaluasi kinerja keuangan secara periodik. Dengan demikian, sistem pencatatan akuntansi berperan penting dalam menjamin keandalan dan ketepatan informasi keuangan yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan serta pengambilan keputusan ekonomi yang rasional.

Sistem pencatatan akuntansi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu sistem manual dan sistem berbasis komputer. Keduanya memiliki karakteristik, kelebihan, serta keterbatasan masing-masing yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan suatu organisasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemilihan sistem pencatatan yang tepat bergantung pada skala usaha, jumlah transaksi, kemampuan sumber daya manusia, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

1. Sistem Manual

Sistem pencatatan manual merupakan metode tradisional yang dilakukan secara konvensional menggunakan alat tulis dan buku akuntansi seperti jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu. Setiap transaksi dicatat secara berurutan sesuai waktu terjadinya, kemudian dipindahkan (diposting) ke akun-akun terkait dalam buku besar. Sistem manual masih banyak digunakan oleh organisasi berskala kecil seperti BUMDes atau

²⁷ Hery, *Siklus Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Grasindo, 2020).

koperasi karena prosesnya relatif sederhana dan tidak membutuhkan dukungan perangkat lunak akuntansi. Sistem ini cocok diterapkan di lingkungan yang belum memiliki infrastruktur teknologi informasi yang memadai.²⁸

Namun demikian, sistem manual memiliki beberapa kelemahan mendasar. Kesalahan manusia (*human error*) sering terjadi, baik karena salah pencatatan, pengulangan data, maupun kehilangan bukti transaksi. Selain itu, proses penyusunan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama karena seluruh perhitungan dilakukan secara manual. Dari sisi pengawasan, sistem manual juga relatif kurang aman karena dokumen fisik mudah rusak, hilang, atau dimanipulasi. Oleh karena itu, meskipun sederhana dan mudah diterapkan, sistem ini kurang efisien untuk organisasi dengan volume transaksi yang besar atau dengan kebutuhan pelaporan yang cepat dan akurat.

2. Sistem Berbasis Komputer

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pencatatan akuntansi berbasis komputer mulai banyak diterapkan, termasuk di sektor publik dan pemerintahan desa. Sistem ini menggunakan perangkat lunak (*software*) seperti *Zahir Accounting*, *Accurate*, *MYOB*, atau *Siskeudes* (Sistem Keuangan Desa) untuk memproses transaksi keuangan secara otomatis. Sistem berbasis komputer memiliki kemampuan untuk mengolah data secara cepat dan akurat, menyimpan informasi dalam basis data yang terorganisir, serta menghasilkan laporan keuangan secara *real-time* tanpa perlu proses manual yang panjang.²⁹

Keunggulan utama sistem ini adalah efisiensi waktu dan peningkatan akurasi pencatatan. Transaksi keuangan dapat langsung

²⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

²⁹ Wiratna Sujarweni, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020).

diklasifikasikan ke akun-akun yang sesuai, sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, sistem berbasis komputer juga meningkatkan keamanan data karena memiliki fitur cadangan (*backup*), proteksi sandi, serta audit trail yang memungkinkan pelacakan setiap perubahan data. Penerapan sistem berbasis komputer membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik untuk pembelian perangkat lunak, pelatihan pengguna, maupun pemeliharaan sistem. Pengguna juga harus memiliki kompetensi dasar dalam akuntansi dan teknologi agar sistem dapat berfungsi secara optimal.³⁰

Pemilihan antara sistem manual atau berbasis komputer perlu mempertimbangkan faktor kesiapan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi desa. Pada tahap awal, banyak BUMDes masih menggunakan sistem manual karena keterbatasan tenaga akuntansi dan akses terhadap perangkat komputer. Namun, dengan adanya program pemerintah seperti penerapan Siskeudes oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, BUMDes mulai diarahkan untuk mengadopsi sistem pencatatan berbasis komputer agar laporan keuangannya lebih transparan, akurat, dan sesuai standar akuntansi desa. Dengan demikian, sistem pencatatan berbasis komputer diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes.³¹

c. Sistem Pencatatan

Terdapat beberapa metode pencatatan yang dapat diterapkan, yaitu sistem *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Perbedaan utama antara pembukuan dan akuntansi terletak pada metode pencatatan yang digunakan. Pembukuan umumnya memakai sistem *single entry*, sedangkan akuntansi

³⁰ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

³¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes* (Jakarta: BPKP, 2022).

menggunakan sistem yang lebih lengkap, seperti *double entry* maupun *triple entry*.³²

1. *Single Entry* (Pencatatan Tunggal)

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau pencatatan tunggal. *Single entry* merupakan sistem pencatatan sederhana yang hanya mencatat satu sisi transaksi, biasanya berupa penerimaan atau pengeluaran kas. Pada sistem *single entry*, transaksi ekonomi dicatat hanya satu kali dalam proses pembukuan. Transaksi yang menyebabkan kas bertambah dicatat pada bagian penerimaan, sedangkan transaksi yang mengurangi kas dicatat pada bagian pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU). Sistem ini dikenal sebagai metode pembukuan sederhana. Metode *single entry* memiliki keunggulan karena prosesnya mudah dipahami dan sederhana untuk diterapkan. Namun, terdapat beberapa kelemahan, seperti kurang efektif dalam penyusunan laporan keuangan serta sulit digunakan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem ini juga belum mampu menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam praktik akuntansi digunakan sistem pencatatan yang lebih baik, yaitu *double entry*, guna mengatasi berbagai kelemahan tersebut.

2. *Double Entry* (Pencatatan Berpasangan)

Sistem pencatatan *double entry* sering disebut juga sistem tata buku berpasangan atau pencatatan berpasangan. *Double entry* merupakan sistem akuntansi yang mencatat setiap transaksi keuangan ke dalam dua sisi yang saling berhubungan, yaitu debit dan kredit. Setiap transaksi dicatat sekurang-kurangnya pada dua akun berbeda dengan jumlah nominal yang sama, sehingga total debit selalu seimbang dengan total kredit. Pada dasarnya, setiap transaksi ekonomi dalam sistem *double entry* dicatat sebanyak dua kali. Artinya, setiap transaksi sekurang-kurangnya memengaruhi dua akun, yaitu

³² Erlina, Omar Sakti Rambe, and Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua* (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

satu pada sisi debit dan satu pada sisi kredit. Posisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan kredit berada di sebelah kanan. Dalam proses pencatatan, keseimbangan antara jumlah debit dan kredit harus selalu dijaga sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Metode pencatatan dengan sistem *double entry* ini dikenal juga dengan istilah penjurnalan.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan *triple entry* pada dasarnya merupakan pengembangan dari sistem *double entry* yang disertai dengan pencatatan tambahan pada buku anggaran. Pencatatan dalam buku anggaran dilakukan untuk mencatat penggunaan anggaran yang sesuai dengan transaksi yang telah dicatat melalui sistem *double entry*. Dengan penerapan sistem *triple entry*, sisa anggaran pada setiap komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diketahui dengan lebih jelas. Proses pencatatan ini dilakukan bersamaan dengan pencatatan *double entry*, sehingga ketika transaksi dicatat oleh bagian pembukuan atau bagian keuangan pemerintah daerah, transaksi tersebut juga dicatat dalam buku anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan akuntansi merupakan bagian penting dari proses akuntansi yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pencatatan yang baik akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Terdapat beberapa jenis sistem pencatatan yang umum digunakan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas berbeda. Sistem *single entry* merupakan metode paling sederhana karena hanya mencatat satu sisi transaksi, sehingga kurang memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan. Sementara itu, sistem *double entry* mencatat setiap transaksi pada dua sisi, yaitu debit dan kredit, sehingga mampu menunjukkan keseimbangan dan meningkatkan keakuratan laporan keuangan.

Sedangkan sistem *triple entry* merupakan pengembangan dari sistem berpasangan dengan menambahkan pencatatan pada buku anggaran, sehingga tidak hanya mencerminkan posisi keuangan tetapi juga menunjukkan realisasi anggaran dan sisa dana yang tersedia. Dengan demikian, semakin kompleks sistem pencatatan yang digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat keandalan, akurasi, serta kemampuan sistem tersebut dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan suatu entitas, termasuk BUMDes.

d. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan landasan yang digunakan dalam menentukan kapan suatu transaksi keuangan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan.³³ Dengan kata lain, basis akuntansi menjelaskan waktu pengakuan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang terjadi dalam suatu entitas. Basis akuntansi adalah seperangkat aturan atau prinsip yang digunakan untuk menentukan kapan pengaruh dari suatu transaksi ekonomi diakui dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan.

Dalam praktiknya, dikenal tiga jenis basis akuntansi yang umum digunakan, yaitu basis kas (*cash basis*), basis akrual (*accrual basis*), dan basis campuran (*modified basis*). Pada basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima, dan beban diakui ketika kas dibayarkan. Sistem ini relatif sederhana dan mudah diterapkan karena hanya berfokus pada arus kas masuk dan keluar tanpa memperhatikan kapan transaksi sebenarnya terjadi. Basis kas sering digunakan oleh organisasi kecil dan lembaga pemerintahan di tingkat desa karena tidak membutuhkan tenaga ahli akuntansi dan sistem pencatatan yang rumit. Namun demikian, kelemahan dari sistem ini adalah informasi keuangan yang dihasilkan kurang lengkap karena tidak mencerminkan posisi keuangan

³³ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015).

yang sesungguhnya, terutama terkait piutang dan kewajiban yang belum direalisasikan.³⁴

Berbeda dengan basis kas, basis akrual mengakui pendapatan pada saat diperoleh (*earned*) dan beban pada saat terjadi (*incurred*), tanpa menunggu adanya penerimaan atau pengeluaran kas. Basis ini dianggap lebih menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya karena mencatat seluruh hak dan kewajiban entitas dalam suatu periode. Basis akrual memberikan informasi yang lebih relevan dan komprehensif bagi para pengguna laporan keuangan karena mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi, bukan hanya transaksi kas. Penerapan basis akrual dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan karena setiap transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban sudah diakui meskipun belum terjadi arus kas.³⁵

Selain dua basis tersebut, terdapat pula basis campuran (*modified basis*), yaitu metode pencatatan yang menggabungkan unsur-unsur dari basis kas dan basis akrual. Pada metode ini, beberapa transaksi dicatat dengan menggunakan basis kas, sementara transaksi lainnya menggunakan basis akrual. Misalnya, pendapatan dicatat ketika kas diterima (basis kas), tetapi beban diakui ketika kewajiban timbul (basis akrual). Basis campuran umumnya digunakan oleh entitas yang sedang dalam proses transisi dari sistem kas menuju sistem akrual, seperti pemerintah daerah, koperasi, atau BUMDes yang sedang membangun sistem akuntansinya. Basis ini dianggap fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki suatu organisasi.³⁶

Pemilihan basis akuntansi sangat bergantung pada tingkat kemampuan sumber daya manusia, volume transaksi, dan kesiapan sistem akuntansi yang digunakan. Sebagian besar BUMDes di Indonesia masih menggunakan basis

³⁴ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa: Panduan Pengelolaan Keuangan Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

³⁵ Halim and Kusufi, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*.

³⁶ Mohamad Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016).

kas karena lebih sederhana dan mudah diterapkan. Namun, seiring dengan adanya peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong penerapan basis akrual dalam sistem pencatatan BUMDes. Menurut BPKP, penerapan basis akrual dalam sistem keuangan desa dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa basis akuntansi merupakan fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan basis kas cocok untuk entitas yang masih sederhana dan belum memiliki sistem akuntansi yang kompleks, sedangkan basis akrual lebih tepat untuk entitas yang ingin meningkatkan transparansi dan keandalan informasi keuangannya. Sementara itu, basis campuran menjadi pilihan transisi yang efektif bagi entitas yang sedang beradaptasi menuju sistem akuntansi modern. Pemilihan basis akuntansi yang sesuai akan berdampak langsung terhadap kualitas, akurasi, dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes maupun entitas lainnya.

4. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Setelah transaksi dicatat dalam jurnal dan dipindahkan ke buku besar (*ledger*), langkah selanjutnya adalah menyusun laporan akuntansi guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan akuntansi tersebut dikenal sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan hasil akhir dari proses pencatatan serta pengikhtisaran transaksi bisnis yang telah dilakukan sebelumnya.

³⁷ (BPKP), *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes*.

Seorang akuntan tidak hanya dituntut mampu mengelola data akuntansi hingga menjadi laporan keuangan, tetapi juga harus dapat memahami, menafsirkan, dan menganalisis laporan keuangan yang disusunnya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan adalah penyajian yang disusun secara sistematis mengenai kondisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No. 1 (2015:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam bentuk laporan arus kas maupun laporan arus dana, serta catatan atas laporan keuangan dan penjelasan lain yang menjadi bagian penting dari laporan tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga dapat dilengkapi dengan skedul maupun informasi tambahan yang berkaitan, seperti informasi keuangan berdasarkan segmen industri, wilayah geografis, serta pengungkapan mengenai dampak perubahan harga.³⁸

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi dan aktivitas keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Melalui laporan keuangan, berbagai informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan berperan sebagai media informasi yang menghubungkan pihak pengelola dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan dan tingkat kinerja dalam suatu periode tertentu. Adapun laporan

³⁸ Ivan Gumilar Sambas Putra et al., *Analisis Laporan Keuangan* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

keuangan disusun secara sistematis berdasarkan urutan proses penyajiannya sebagai berikut:³⁹

1. Laporan laba rugi (*Income Statement*) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi secara sistematis mengenai pendapatan dan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan hasil kegiatan operasional perusahaan, apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian selama periode berjalan. Nilai laba atau rugi bersih diperoleh dari selisih antara seluruh pendapatan dan keuntungan dengan seluruh beban serta kerugian yang terjadi.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) merupakan laporan yang menyajikan perubahan modal atau hak kepemilikan pemilik dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menunjukkan bertambah atau berkurangnya ekuitas yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti laba bersih, rugi usaha, tambahan investasi pemilik, maupun pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, laporan ini sering pula disebut sebagai laporan perubahan modal.
3. Neraca (*Balance Sheet*) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu secara sistematis. Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Aset menunjukkan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, kewajiban mencerminkan utang atau tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain, sedangkan ekuitas menunjukkan hak pemilik atas kekayaan perusahaan setelah dikurangi kewajiban.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar

³⁹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015).

perusahaan selama satu periode tertentu. Arus kas tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan, aktivitas investasi berhubungan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, sedangkan aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan modal dan pinjaman perusahaan.

Laporan keuangan umumnya disertai dengan catatan atas laporan keuangan (*notes to the financial statements*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, lengkap, dan mendalam mengenai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan utama. Dengan adanya catatan tersebut, pengguna laporan keuangan dapat memahami isi laporan keuangan secara lebih jelas dan menyeluruh.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Memberikan informasi mengenai kondisi keuangan serta perubahan kondisi keuangan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi tersebut membantu para pengguna laporan dalam memahami keadaan aset, kewajiban, modal, serta perkembangan keuangan dalam periode tertentu.
2. Laporan keuangan juga bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja, terutama yang berkaitan dengan tingkat laba atau profitabilitas. Informasi ini penting untuk menilai potensi perkembangan sumber daya ekonomi di masa mendatang, termasuk kemampuan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Dengan

⁴⁰ Azwari Peny Cahaya et al., *Akuntansi Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2022).

demikian, pengguna laporan dapat menilai efektivitas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

3. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode pelaporan. Informasi tersebut berguna untuk menilai kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan kas, sekaligus mengetahui kebutuhan terhadap arus kas guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional.
4. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Melalui laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai bagaimana manajemen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

c. Manfaat Laporan Keuangan

Dalam setiap kegiatan usaha, aspek keuangan menjadi bagian yang sangat penting karena seluruh aktivitas operasional selalu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana. Oleh sebab itu, diperlukan suatu laporan yang mampu mencatat dan menyajikan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama kegiatan usaha berlangsung. Transaksi tersebut mencakup berbagai aktivitas, seperti penerimaan dana, pengeluaran biaya, pembayaran kewajiban, maupun perolehan pendapatan. Melalui pencatatan tersebut, dapat diketahui sumber dana yang diperoleh serta bagaimana dana tersebut digunakan dalam menjalankan aktivitas usaha. Laporan yang memuat informasi mengenai seluruh transaksi keuangan tersebut dikenal sebagai laporan keuangan. Berikut manfaat laporan keuangan:⁴¹

⁴¹ Sufyati et al., *Analisis Laporan Keuangan* (Cirebon: Insania, 2021).

a. Sebagai Sarana Evaluasi

Laporan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menilai perkembangan dan kondisi suatu usaha dalam periode tertentu. Melalui laporan keuangan, dapat diketahui kebutuhan serta penggunaan dana, sehingga membantu dalam mengevaluasi kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan dengan pihak lain.

b. Sebagai Dasar Pengembangan dan Inovasi

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menciptakan ide baru dan melakukan pengembangan usaha. Dengan melihat kondisi keuangan, pelaku usaha dapat menentukan langkah strategis, seperti memperluas usaha, mengembangkan produk, maupun melakukan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar.

c. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Laporan keuangan disusun sebagai bentuk tanggung jawab atas seluruh aktivitas dan transaksi keuangan yang telah dilakukan. Penyusunan laporan tersebut menunjukkan bagaimana pengelolaan dana dilakukan secara jelas, teratur, dan transparan sesuai dengan aktivitas usaha yang dijalankan.

d. Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat membantu pihak manajemen atau pemimpin usaha dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi keuangan, sehingga keputusan yang diambil dapat dilakukan secara lebih tepat dan efektif.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari desa melalui penyertaan modal

yang bersumber dari kekayaan desa.⁴² Kehadiran BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa. Pembentukan BUMDes dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes menjadi forum tertinggi dalam proses pengambilan keputusan terkait BUMDes, mulai dari penetapan nama badan usaha, pemilihan pengurus, hingga penentuan jenis usaha yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.⁴³

BUMDes dibentuk sebagai lembaga desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset serta potensi desa dengan dukungan modal yang berasal dari penyertaan desa. Namun demikian, tidak seluruh kegiatan ekonomi yang ada di desa menjadi bagian dari pengelolaan BUMDes. Di desa masih terdapat berbagai lembaga atau aktivitas ekonomi lain yang berada di luar ruang lingkup BUMDes dan tidak dapat dijadikan bagian dari BUMDes. Oleh karena itu, keberhasilan perkembangan ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh peran dan kebijakan Kepala Desa dalam mengelola serta mengarahkan potensi desa yang ada.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan serta memperkuat perekonomian desa.⁴⁴ Pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki desa sehingga usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan desa itu sendiri. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari,

⁴² Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020).

⁴³ Hendrarto Conrad, *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDes Syariah* (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020).

⁴⁴ Sopanah Ana, Reny Kurniawati, and Dwi Anggarani, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal* (Surabaya: Sconpindo Media Pustaka, 2023).

membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan usaha.

BUMDes mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Adapun beberapa ciri utama BUMDes yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Pengelolaan dan penguasaan BUMDes berada di bawah kewenangan desa serta dijalankan secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
2. Modal usaha berasal dari penyertaan modal desa dan partisipasi masyarakat, di mana sebagian besar modal berasal dari desa dan sisanya berasal dari masyarakat melalui sistem penyertaan modal atau andil usaha.
3. Kegiatan operasional BUMDes menerapkan prinsip usaha yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan secara bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat desa.
4. Jenis usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi desa serta mempertimbangkan kebutuhan dan peluang pasar yang tersedia sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal.
5. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung kepentingan bersama.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pemberian dukungan terhadap BUMDes dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah provinsi agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, pembentukan dan pengelolaan BUMDes merupakan bentuk pengembangan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara

⁴⁵ Syamsul Hadi et al., *PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR: Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Yogyakarta: StarDigital Publishing, 2025).

bersama dengan mengedepankan prinsip kerja sama, partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, serta keberlanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara sungguh-sungguh agar mampu berkembang secara mandiri, berjalan efektif, dan dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa.⁴⁶ Kehadiran BUMDes sebagai lembaga ekonomi di wilayah pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga usaha pada umumnya, karena BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perbedaan tersebut bertujuan agar keberadaan dan pengelolaan BUMDes mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat menjaga nilai-nilai sosial dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat desa sehingga perkembangan kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau sistem usaha yang bersifat kapitalistis. Dengan demikian, BUMDes diharapkan mampu menjadi sarana penggerak ekonomi desa yang tetap memperhatikan nilai gotong royong, kebersamaan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga usaha komersial pada umumnya, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Riant Nugroho and Firre An Suprpto, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021).

⁴⁷ Prasetya Eka, *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes* (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020).

1. BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Sumber modal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa dan partisipasi masyarakat, di mana sebagian besar modal berasal dari desa dan sisanya berasal dari masyarakat melalui sistem saham atau andil usaha.
3. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDes menerapkan prinsip bisnis yang tetap berpedoman pada nilai-nilai budaya lokal dan kearifan masyarakat setempat.
4. Jenis usaha yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi desa serta mempertimbangkan kebutuhan dan peluang pasar yang tersedia.
5. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota penyerta modal melalui kebijakan yang ditetapkan desa.
6. BUMDes memperoleh dukungan, pembinaan, dan fasilitasi dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa.
7. Pelaksanaan kegiatan operasional BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat agar pengelolaannya tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bentuk pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kerja sama, partisipasi masyarakat, keterbukaan, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang serius agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan secara efektif, efisien, mandiri, dan profesional sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa. Upaya untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan

melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif, dengan menyediakan pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dengan adanya pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi desa serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁴⁸

Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui BUMDes diupayakan agar tidak memberikan beban yang berlebihan bagi masyarakat desa, mengingat BUMDes diharapkan menjadi lembaga usaha utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Selain melayani kebutuhan masyarakat desa, BUMDes juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada pihak di luar desa dengan tetap menerapkan harga dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pasar. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme kelembagaan serta aturan yang disepakati bersama agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau gangguan terhadap kondisi ekonomi di wilayah pedesaan.

Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa BUMDes dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁹

1. Adanya kebutuhan masyarakat desa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang perlu didukung melalui kegiatan usaha desa.

⁴⁸ Ana Sopanah, Reny Kurniawati, and Dwi Anggarani, *PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) BERBASIS KEARIFAN LOKAL* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

⁴⁹ Conrad Hendarto, *MEMBANGUN EKONOMI BERKEADILAN DI DESA Melalui BUMDes Syariah* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020).

2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal, terutama aset dan kekayaan desa yang memiliki peluang untuk dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar.
3. Terdapat sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola badan usaha sehingga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
4. Adanya berbagai unit usaha masyarakat yang masih dikelola secara terpisah dan belum mendapatkan pengelolaan maupun koordinasi yang baik, sehingga keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi wadah dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih terorganisir.

BUMDes menjadi sarana dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha yang ada di desa. Yang dimaksud dengan usaha desa adalah berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan pelayanan dan pengembangan ekonomi masyarakat desa, di antaranya sebagai berikut:

1. Usaha di bidang jasa, seperti layanan keuangan, transportasi darat maupun air, penyediaan listrik desa, serta berbagai usaha jasa lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat.
2. Kegiatan distribusi dan penyediaan sembilan bahan pokok guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa.
3. Usaha perdagangan hasil pertanian yang mencakup berbagai komoditas tanaman pangan yang dihasilkan masyarakat desa.
4. Kegiatan usaha di bidang perkebunan, peternakan, perikanan, serta usaha agribisnis lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
5. Usaha industri kecil dan kerajinan masyarakat yang bertujuan meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, pengertian BUMDes juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam

peraturan tersebut disebutkan bahwa BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa, dengan kepemilikan modal serta pengelolaannya dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.⁵⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk di tingkat desa sebagai sarana untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Secara sederhana, keberadaan BUMDes dapat dipahami sebagai bentuk badan usaha di desa, sebagaimana di tingkat pusat terdapat BUMN dan di tingkat daerah terdapat BUMDes. BUMDes menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang nantinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan desa dan kesejahteraan masyarakat.⁵¹ Keberadaan BUMDes sebenarnya telah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Namun, setelah berlakunya undang-undang tersebut, peran dan posisi BUMDes menjadi semakin penting dan strategis dalam pembangunan desa. Bahkan, pendirian dan pengembangan BUMDes pernah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa pada tahun 2017 sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dibentuk oleh desa untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes dapat dipahami sebagai badan usaha yang berada di tingkat desa, sebagaimana pemerintah pusat memiliki BUMN dan pemerintah daerah memiliki BUMD. Dalam pelaksanaannya, BUMDes menjalankan berbagai kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian digunakan untuk mendukung pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

⁵⁰ Amir M, *Penguatan BUMDES Pilar Perekonomian Desa Terpencil* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023).

⁵¹ Utaminingsih Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari, *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis* (Malang: UB Press, 2020).

Setelah BUMDes dibentuk, di desa terdapat dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda, yaitu pemerintah desa dan BUMDes. Kedua lembaga tersebut merupakan entitas yang terpisah, baik dari segi kedudukan maupun pengelolaannya. Dalam aspek keuangan, kekayaan yang dimiliki pemerintah desa dipisahkan dari kekayaan BUMDes sehingga pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Pengurus atau pengelola BUMDes juga bukan bagian dari perangkat desa. Pengelolaan BUMDes diserahkan kepada pihak yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kompetensi dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, pengelola BUMDes diharapkan memiliki sikap profesional, jiwa kewirausahaan, serta kemampuan manajerial agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

b. Dasar Hukum BUMDes

Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan singkatan BUMDES, merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh desa dan dikelola oleh pemerintah serta masyarakat desa. BUMDES bertujuan untuk mendayagunakan semua potensi, baik potensi ekonomi, sumber daya alam dan manusia, serta potensi lain yang dimiliki oleh desa.

Dasar hukum utama pembentukan BUMDES adalah undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Munculnya peraturan ini sekaligus menjadi fondasi awal dari pendirian berbagai BUMDES di Indonesia. Permodalan BUMDES menurut PP Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa yang dapat bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, dan aset Desa.⁵²

⁵² Diah Retno Wulandaru et al., *Kepemimpinan Transformasional Menuju Era Keberlanjutan* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024).

Pemerintah desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut, desa diberikan wewenang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pendirian BUMDES, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang semakin mempertegas peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga memperkuat kerangka hukum pendirian dan pengelolaan BUMDES.

Pembentukan BUMDES merupakan salah satu strategi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa serta kesejahteraan masyarakatnya. BUMDES diharapkan mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, BUMDES diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, serta menekan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.

Langkah strategis pemerintah dalam memperkuat posisi hukum BUMDES diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi tonggak penting karena memberikan status badan hukum kepada BUMDES, menggantikan kedudukannya yang sebelumnya hanya sebagai badan usaha biasa. Dengan pengakuan sebagai badan hukum, BUMDES kini memiliki posisi legal yang lebih kuat, khususnya dalam aspek kerja sama, pengelolaan aset, serta akses terhadap sumber pembiayaan dan permodalan. Hal ini turut menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi BUMDES, terutama dalam mengakses modal usaha yang sebelumnya terkendala karena

belum memiliki legitimasi hukum yang jelas. Dengan dukungan regulasi yang semakin solid, BUMDES diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal.⁵³

c. Fungsi BUMDes

Sumber permodalan atau dana BUMDes dapat diperoleh dari berbagai pihak, seperti pemerintah desa, simpanan atau tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, modal BUMDes juga dapat berasal dari pinjaman, penyertaan modal pihak lain, serta kerja sama bagi hasil yang dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, BUMDes diperbolehkan melakukan pinjaman, namun pelaksanaannya harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan desa yang memuat seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu periode anggaran. APB Desa disusun melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa.⁵⁴

⁵³ Wuryan Andayani et al., *Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Pilar Keberhasilan Bumdes* (Depok: Rajawali Pers, 2025).

⁵⁴ Aromatica Desna et al., *Membangun Desa Dengan Revolusi Digital* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki peran sebagai salah satu penggerak kegiatan ekonomi di desa yang menjalankan fungsi sosial sekaligus fungsi usaha atau komersial. Selain itu, BUMDes juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi dan sumber daya desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.
2. Berperan sebagai lembaga sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial bagi warga desa.
3. Berfungsi sebagai lembaga usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan melalui pembukaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di desa.

d. Permasalahan BUMDes di Indonesia

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh BUMDES yang dapat memengaruhi efektivitas dan keberhasilannya. Berikut adalah beberapa permasalahan utama BUMDES di Indonesia.⁵⁵

1. Keterbatasan Modal dan Pembiayaan

Banyak BUMDes menghadapi kendala dalam memperoleh modal awal yang cukup untuk memulai usaha. Selain itu, akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga mikro juga masih

⁵⁵ Andayani et al., *Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Pilar Keberhasilan Bumdes*.

sangat terbatas. Hal ini menyebabkan BUMDes sulit mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Manajemen dan Pengelolaan yang Lemah

Salah satu masalah utama yang dihadapi BUMDes adalah lemahnya kemampuan manajerial pengurus. Kurangnya keterampilan dalam bidang manajemen dan bisnis berdampak pada pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Pencatatan dan pelaporan keuangan sering kali tidak akurat, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

3. Perencanaan dan Strategi Bisnis yang Tidak Memadai

Banyak BUMDes belum memiliki rencana bisnis yang jelas dan terarah. Ketidadaan strategi usaha yang tepat juga membuat BUMDes kesulitan dalam menghadapi persaingan dan mengembangkan unit usaha. Kurangnya perencanaan menyebabkan pengelolaan usaha cenderung berjalan tanpa arah dan tidak memiliki target jangka panjang yang terukur.

4. Kurangnya Dukungan dan Pembinaan

Dukungan dari pemerintah daerah sering kali tidak konsisten dan belum menyentuh kebutuhan nyata BUMDes. Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi pengurus masih minim, sehingga kemampuan mereka dalam manajemen dan pengembangan usaha belum optimal. Keterbatasan pembinaan ini membuat BUMDes sulit untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaannya.

5. Masalah dalam Pemasaran dan Penjualan

Keterbatasan akses pasar menjadi salah satu hambatan utama BUMDes dalam menjual produk dan jasa yang dihasilkan. Kurangnya strategi promosi dan branding juga mengakibatkan produk BUMDes kurang dikenal masyarakat luas. Hal ini berdampak pada rendahnya penjualan dan kurangnya daya saing di pasar.

6. Regulasi dan Kebijakan yang Kurang Mendukung

Beberapa peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan BUMDes dinilai

belum mendukung secara maksimal. Prosedur administratif yang rumit serta ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan dan operasional sering kali menjadi kendala yang menghambat efektivitas BUMDes dalam menjalankan kegiatan usaha.

7. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah

Banyak BUMDes masih mengandalkan dana bantuan atau subsidi dari pemerintah tanpa berupaya mengembangkan sumber pendapatan alternatif. Ketergantungan ini menghambat kemandirian finansial BUMDes dan membuatnya sulit untuk bertahan jika bantuan pemerintah berkurang.

8. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan formal dan minimnya keterampilan teknis maupun manajerial di kalangan pengurus BUMDes menjadi faktor penting yang membatasi kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Keterbatasan ini menyebabkan pengambilan keputusan sering tidak didukung oleh analisis yang tepat.

9. Budaya dan Keterlibatan Komunitas yang Lemah

Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes masih tergolong rendah. Kurangnya rasa memiliki serta budaya kerja yang belum terbentuk dengan baik membuat pengelolaan BUMDes tidak berjalan optimal. Etos kerja yang lemah juga berpengaruh terhadap produktivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha.

10. Kondisi Eksternal yang Tidak Stabil

Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan bencana alam turut menjadi ancaman bagi keberlangsungan BUMDes. Ketidakstabilan ekonomi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan permintaan pasar, sementara bencana alam berpotensi merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas operasional BUMDes.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, masyarakat, serta sektor swasta. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pelatihan dan pengembangan kapasitas, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus serta anggota BUMDes agar memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, pengelolaan keuangan, dan pemasaran.
2. Peningkatan akses pembiayaan, melalui kemudahan dalam memperoleh modal usaha, baik dari lembaga keuangan formal maupun program pendanaan pemerintah, guna memperkuat permodalan awal BUMDes.
3. Pendampingan dan konsultasi berkelanjutan, dengan menyediakan bimbingan teknis dan pendampingan manajerial untuk membantu pengurus BUMDes dalam mengembangkan usaha secara efektif dan berkelanjutan.
4. Penguatan kebijakan dan regulasi, yakni penyusunan serta penerapan peraturan yang berpihak pada pengembangan dan keberlanjutan BUMDes, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi dan kejelasan status hukum.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat, dengan mendorong keterlibatan aktif warga desa dalam pengelolaan, pengawasan, serta pemanfaatan hasil usaha BUMDes agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan lembaga.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMDes dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap”. Untuk memperjelas makna dari judul penelitian, diperlukan penjelasan mengenai definisi dan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman dalam memahami inti pembahasan yang akan diuraikan dalam penelitian.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan suatu kebijakan, rencana, atau sistem ke dalam praktik nyata agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi tidak hanya mencakup aktivitas pelaksanaan, tetapi juga melibatkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, implementasi sistem pencatatan akuntansi di BUMDes Kuncup Mekar dimaknai sebagai proses penerapan prosedur pencatatan transaksi keuangan yang meliputi pemahaman pengelola terhadap sistem pencatatan akuntansi, kesesuaian prosedur pencatatan dengan tahapan akuntansi yang berlaku, kelengkapan dan ketertiban dalam mencatat setiap transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi yang sah, penerapan standar akuntansi dalam penyajian laporan keuangan, serta adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pencatatan keuangan. Seluruh indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pencatatan akuntansi telah diimplementasikan secara efektif dalam mendukung penyajian laporan keuangan BUMDes yang akuntabel dan andal.

2. Sistem Pencatatan Akuntansi

Sistem pencatatan akuntansi merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas seluruh

transaksi keuangan secara sistematis dan teratur, dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan.⁵⁶ Sistem pencatatan akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi menyediakan data keuangan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar mencakup proses pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi yang sah, penggunaan metode pencatatan yang diterapkan, baik secara manual maupun elektronik, serta penerapan mekanisme pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Indikator sistem pencatatan akuntansi dalam penelitian ini meliputi kelengkapan bukti transaksi, ketepatan pencatatan transaksi, penggunaan metode pencatatan akuntansi (*single entry* atau *double entry*), keteraturan dalam pencatatan dan pengarsipan data keuangan, serta kesesuaian sistem pencatatan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BUMDes. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pencatatan akuntansi telah diterapkan secara efektif dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

3. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan tahap akhir dari proses akuntansi, yaitu penyusunan hasil pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan ke dalam bentuk laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan ekuitas suatu entitas.⁵⁷ Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015, laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,

⁵⁶ Nur Faizah Aris, "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Laporan Keuangan PT. Niaga Nusa Abadi Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)" (IAIN Parepare, 2023).

⁵⁷ Jilma Dewi Ayu Ningtiyas, "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan)," *Riset & Jurnal Akuntansi* 2, no. 1 (2017): 11–17.

serta catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁵⁸ Dalam konteks penelitian ini, penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar diartikan sebagai proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang disusun berdasarkan data hasil pencatatan akuntansi dan disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Indikator penyajian laporan keuangan dalam penelitian ini meliputi kelengkapan jenis laporan keuangan yang disusun, kesesuaian format dan struktur laporan keuangan dengan standar akuntansi, keandalan dan keakuratan informasi yang disajikan, ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, serta kemudahan laporan keuangan untuk dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai kualitas penyajian laporan keuangan BUMDes dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

4. Hambatan/Tantangan

Hambatan atau tantangan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi sistem pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan pada suatu entitas. Dalam penelitian ini, hambatan/tantangan diartikan sebagai berbagai kendala yang dihadapi BUMDes Kuncup Mekar dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Hambatan tersebut antara lain berasal dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman pengelola terhadap akuntansi, ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi, keterbatasan sarana dan pemanfaatan teknologi akuntansi, serta

⁵⁸ Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, and Rahmawati, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 1–22.

belum optimalnya pengawasan dan pendampingan. Hambatan-hambatan ini dianalisis untuk mengetahui faktor penyebab belum optimalnya implementasi sistem pencatatan akuntansi dan kualitas penyajian laporan keuangan BUMDes.

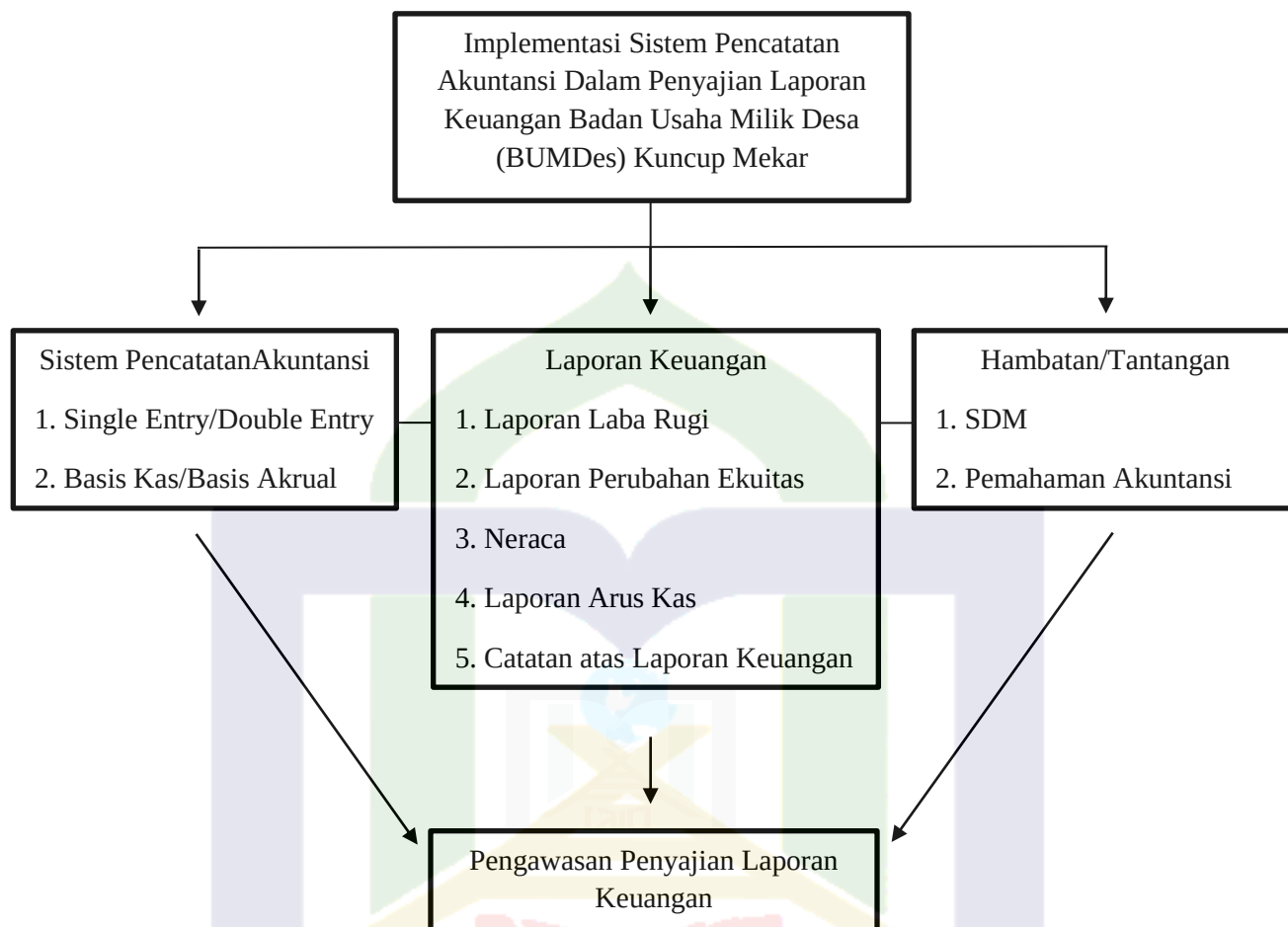
5. Penjabaran penyajian laporan keuangan

Penjabaran penyajian laporan keuangan merupakan uraian mengenai bentuk dan isi laporan keuangan yang disusun sebagai hasil akhir dari sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes. Dalam penelitian ini, penjabaran penyajian laporan keuangan mencakup penyusunan laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang disajikan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Indikator penjabaran penyajian laporan keuangan meliputi kelengkapan jenis laporan keuangan, kejelasan format dan struktur penyajian, konsistensi penyajian antarperiode, serta keterkaitan antara data pencatatan akuntansi dengan laporan keuangan yang dihasilkan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah landasan konseptual yang menghubungkan antara teori, fakta empiris, hasil observasi, dan kajian pustaka yang relevan.⁵⁹ Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan arah penelitian serta menjelaskan hubungan logis antara variabel yang diteliti. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti memiliki panduan yang jelas dalam menganalisis masalah dan menarik kesimpulan berdasarkan teori yang mendasari serta kondisi nyata di lapangan.

⁵⁹ Iin Rosini, *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023).



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menekankan pemahaman secara mendalam terhadap makna, pandangan, dan pengalaman individu maupun kelompok dalam situasi yang spesifik.⁶⁰ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena sosial dengan memperhatikan berbagai aspek, kondisi, dan dinamika yang memengaruhinya. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam proses implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua.

Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara holistik dan kontekstual dengan menekankan pada makna, pemahaman, serta interpretasi dari subjek penelitian terhadap realitas yang mereka alami. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada upaya memahami secara mendalam proses implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara holistik dan kontekstual dengan menekankan pada makna, pemahaman, serta interpretasi dari subjek penelitian terhadap realitas yang mereka alami.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan

⁶⁰ Nurhayati et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktif)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

menjelaskan secara mendalam mengenai suatu fenomena atau peristiwa berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.⁶¹ Deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi sistem pencatatan akuntansi diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali informasi secara menyeluruh mengenai proses pencatatan akuntansi, pemahaman pengurus terhadap prinsip akuntansi, serta kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan jenis penelitian deskriptif ini, peneliti dapat menyediakan informasi yang faktual dan terperinci mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Peneliti akan menyajikan data-data konkret yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga memberikan gambaran yang nyata dan komprehensif tentang praktik pencatatan akuntansi di BUMDes.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar yang terletak di jalan Poros Kulo, Desa Rijang Panua, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Pemilihan lokasi penelitian karena BUMDes Kuncup Mekar merupakan salah satu unit usaha desa yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi sistem pencatatan akuntansi. Berdasarkan observasi awal, BUMDes Kuncup Mekar telah melakukan pencatatan keuangan, namun belum sepenuhnya menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Keterbukaan pihak pengelola BUMDes terhadap kegiatan penelitian serta ketersediaan data

⁶¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

dan informasi yang dibutuhkan menjadi faktor pendukung yang penting dalam menjamin kelancaran dan keakuratan penelitian. Oleh karena itu, BUMDes Kuncup Mekar dipandang sebagai lokasi yang tepat dan representatif untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yang dimana kegiatannya meliputi: pelaksanaan (pengumpulan data), pengelolaan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar, proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kendala yang dihadapi dalam penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, serta pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini berupa informasi dalam bentuk uraian kata, kalimat, dan penjelasan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar. Data kualitatif adalah data yang berbentuk narasi dan tidak dinyatakan dalam angka, tetapi berisi makna yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.⁶² Data ini digunakan untuk memahami proses, kebijakan, serta praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan

⁶² Yudo Handoko, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

pengurus BUMDes secara kontekstual dan faktual.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama dengan tujuan untuk menjawab permasalahan atau mencapai tujuan penelitian.⁶³ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar yaitu bendahara, direktur, sekretaris, komisaris/kepala desa, dan pengawas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak lain atau berbagai sumber pendukung. Data tersebut dapat berupa dokumen tertulis, seperti buku, laporan, majalah, arsip, maupun catatan lain yang bersifat dokumentatif.⁶⁴ Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti laporan keuangan BUMDes, serta berbagai literatur yang membahas sistem akuntansi dan laporan keuangan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menghimpun informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan

⁶³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007).

⁶⁴ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

penelitian. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan pencatatan secara terstruktur terhadap objek atau fenomena yang diteliti.⁶⁵ Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di BUMDes Kuncup Mekar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data faktual tentang bagaimana sistem akuntansi dijalankan di lapangan, mulai dari pencatatan transaksi, penggunaan buku kas atau *software* akuntansi, hingga proses pelaporan. Observasi dilakukan secara nonpartisipatif, artinya peneliti hadir di lokasi sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas pencatatan. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat temuan dari wawancara dan memastikan kesesuaian antara pernyataan informan dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, dalam bentuk percakapan terarah yang berfokus pada topik atau permasalahan tertentu untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan penelitian.⁶⁶ Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang terlibat dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan BUMDes, seperti bendahara, direktur BUMDes, sekretaris, komisaris kepala desa, dan pengawas Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan panduan pertanyaan pokok namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara

⁶⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁶⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

bebas sesuai pengalaman dan pemahamannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip atau catatan mengenai peristiwa masa lalu yang dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya nyata seseorang.⁶⁷ Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumen-dokumen resmi BUMDes seperti laporan keuangan, buku kas umum, jurnal transaksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, notulen rapat pengurus, serta arsip administrasi lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, akurat, dan dapat dipercaya. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kredibilitas serta keandalan hasil penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, pengujian kualitas data dikenal dengan istilah uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas).

Pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas merupakan upaya untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menimbulkan keraguan.⁶⁸ Dalam penelitian kualitatif ini, uji kredibilitas data dilakukan dengan

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007).

⁶⁸ Asep Maulana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

menerapkan metode triangulasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh.

Triangulasi merupakan salah satu teknik uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan keyakinan kepada peneliti bahwa data yang dikumpulkan telah valid dan dapat dipercaya.⁶⁹ Tujuan dari triangulasi adalah untuk memastikan konsistensi dan akurasi data, mengurangi bias atau kesalahan interpretasi, serta memperkuat kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan lebih meyakinkan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda guna menguji tingkat kredibilitas data. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data dari sumber yang sama melalui berbagai metode pengumpulan data yang berbeda, sehingga keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh dapat dipastikan.⁷⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang juga dikenal sebagai proses pengolahan dan penafsiran data. Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup penelaahan, pengelompokan, penyusunan secara sistematis, penafsiran, serta verifikasi terhadap data agar fenomena yang diteliti memiliki makna sosial, akademis, dan ilmiah. Tahapan dalam analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan karakteristik responden, penyusunan tabel data sesuai dengan variabel dan responden, penyajian hasil data untuk setiap variabel penelitian, serta analisis data guna menjawab rumusan masalah

⁶⁹ Sigit Hermawan and Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016).

⁷⁰ Zainal Efendi Hasibuan et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kepustakaan, Dan PTK* (Malang: AE Publishing, 2024).

penelitian.⁷¹ Namun, tahap pengujian hipotesis tidak dilakukan karena penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak berorientasi pada pengujian hipotesis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk mengorganisasikan data, menafsirkan makna, serta menemukan pola hubungan antarfenomena yang diteliti. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa, analisis data kualitatif merupakan proses yang bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga penelitian dianggap selesai, yaitu ketika data yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan atau tidak lagi menghasilkan informasi baru.⁷² Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan pada umumnya cukup banyak dan memiliki beragam bentuk, sehingga perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti melakukan pengamatan di lapangan, maka jumlah serta kompleksitas data yang terkumpul juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan analisis awal melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan untuk menyederhanakan dan merangkum data dengan cara menyeleksi informasi yang paling relevan, menyoroti hal-hal yang penting, mengidentifikasi tema serta pola yang muncul, dan mengabaikan data yang tidak mendukung fokus penelitian.⁷³ Melalui proses ini, data menjadi lebih terarah dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam tahap

⁷¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

⁷² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018).

⁷³ Muhammad Haristo Rahman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: CV. Gita Lentera, 2025).

pengumpulan data berikutnya serta saat menelusuri kembali informasi yang diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses reduksi dilakukan, langkah berikutnya adalah menyajikan data agar informasi yang diperoleh dapat terlihat dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel yang tersusun rapi, grafik, bagan, atau diagram visual lainnya.⁷⁴ Dengan adanya penyajian data yang terstruktur, informasi menjadi lebih terorganisir dan menunjukkan pola hubungan antarunsur, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami makna data secara keseluruhan serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Tahap ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal penelitian masih bersifat sementara sehingga memungkinkan terjadinya perubahan apabila ditemukan data atau bukti baru yang lebih kuat selama proses pengumpulan data berikutnya.⁷⁵ Akan tetapi, apabila kesimpulan awal tersebut tetap didukung oleh data yang valid, konsisten, dan relevan ketika peneliti melakukan pengecekan kembali di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dinyatakan memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi.

⁷⁴ Sri Yani Kusumastuti et al., *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

⁷⁵ Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)," *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BUMDes Kuncup Mekar

BUMDes Kuncup Mekar merupakan Badan Usaha Milik Desa yang didirikan pada tahun 2017 di Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Pembentukan BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang dilakukan secara mandiri dan profesional.

Pada awal berdirinya, BUMDes Kuncup Mekar menjalankan usaha budidaya ikan nila sebagai salah satu unit usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan BUMDes dan masyarakat desa. Namun, usaha budidaya ikan nila tersebut dihentikan pada tahun 2021 karena mengalami kerugian sehingga kegiatan operasionalnya tidak dapat dilanjutkan.

Selain usaha budidaya ikan nila, BUMDes Kuncup Mekar juga menjalankan beberapa jenis usaha di bidang perdagangan dan jasa, antara lain pangkalan gas elpiji 3 kg, unit simpan pinjam, penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), serta jasa penagihan listrik. Berbagai unit usaha tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa.

Dalam perkembangannya, BUMDes Kuncup Mekar terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan guna mendukung terciptanya tata kelola yang lebih baik. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes Kuncup Mekar mulai menyesuaikan sistem pencatatan dan

pelaporan keuangannya agar lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui penggunaan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sebagai alat bantu dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes.

2. Visi dan Misi BUMDes Kuncup Mekar

Visi:

-Terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi pengangguran

Misi:

-Mengelola kegiatan ekonomi desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

-Membuka lapangan kerja

-Pembangunan usaha ekonomi pada berbagai sektor

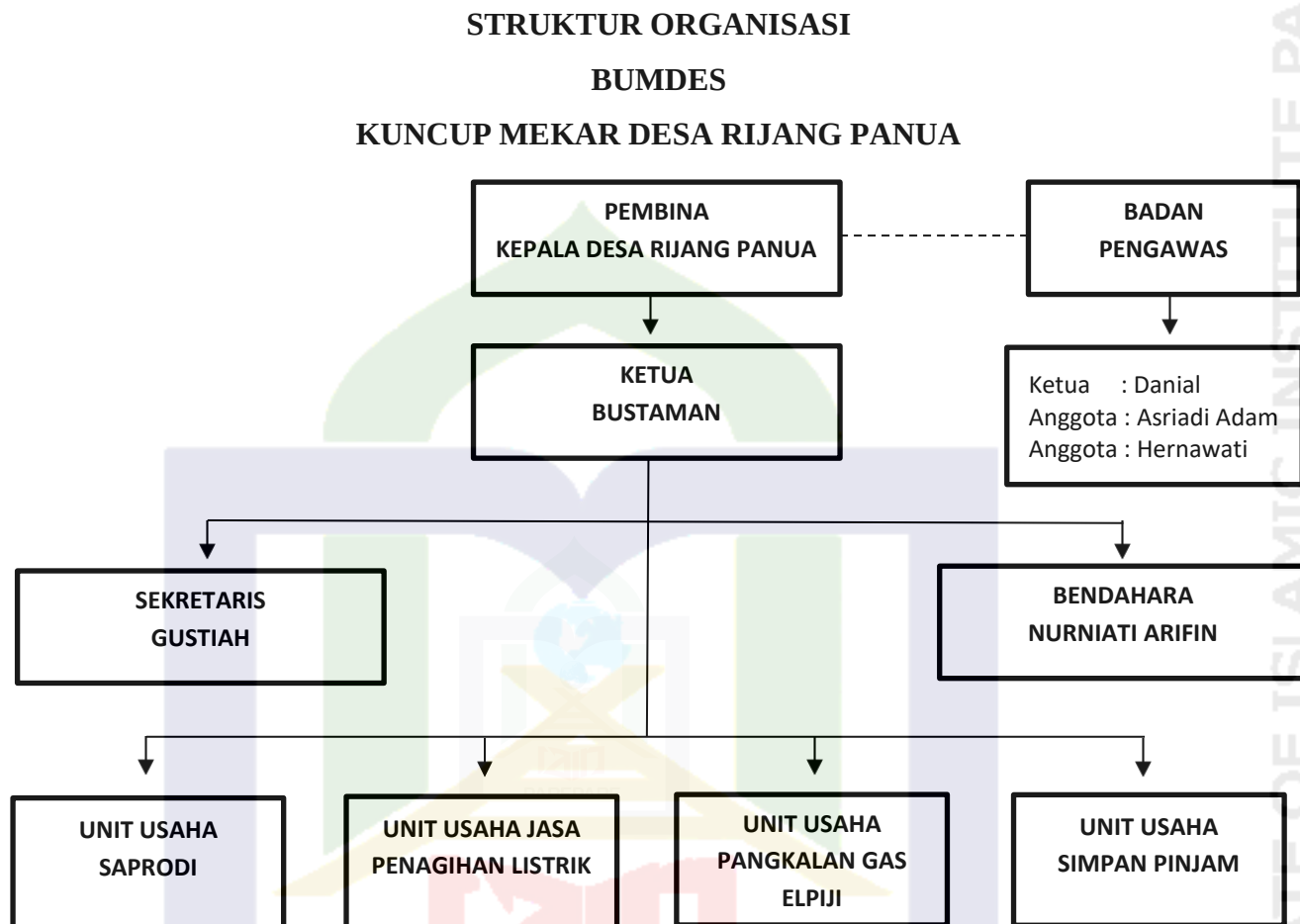
-Mengembangkan jaringan ekonomi dengan berbagai pihak

-Memberikan jasa, menyelenggarakan kepentingan umum dan modal dalam pengembangan ekonomi desa.

-Menjadikan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa

-Meningkatkan pendapatan asli desa

3. Struktur Organisasi BUMDes Kuncup Mekar



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Kuncup Mekar

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian di BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar.

1. Implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap

Implementasi sistem pencatatan akuntansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena melalui sistem pencatatan yang baik akan dihasilkan informasi keuangan yang akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi juga menjadi dasar dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes seringkali masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mengenai akuntansi, serta belum tersedianya sistem pencatatan yang terstruktur. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar, guna melihat sejauh mana pencatatan yang dilakukan telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dalam mencatat transaksi keuangan sehari-hari. Maka peneliti melakukan wawancara langsung yang dikutip dari salah satu seorang pengurus BUMDes Kuncup Mekar yang menjabat sebagai Bendahara, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dulu pencatatan transaksi keuangan itu masih manual, ditulis di buku saja setiap ada pemasukan sama pengeluaran. Jadi semua dicatat satu-satu secara sederhana. Tapi mulai tahun 2024 sudah mulai pakai aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan), jadi sekarang pencatatan sudah dibantu lewat sistem, walaupun kami masih belajar juga cara pakainya.”⁷⁶

⁷⁶ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh informan dalam hal ini, Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau sekarang pencatatan sudah lebih baik karena sudah pakai aplikasi, jadi lebih rapi dibanding sebelumnya. Aplikasi PPAK itu mulai kami pakai sekitar tahun 2024. Tapi memang pengurus masih butuh penyesuaian karena masih belum terlalu terbiasa pakai sistem seperti itu, jadi masih dalam tahap belajar.”⁷⁷

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Ibu Gustiah selaku Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau pencatatan sekarang memang sudah pakai aplikasi PPAK sejak tahun 2024, tapi belum semua pengurus paham, jadi masih perlu belajar lagi supaya pencatatannya bisa lebih baik.”⁷⁸

Metode pencatatan akuntansi merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan, karena menentukan bagaimana dan kapan suatu transaksi keuangan diakui serta dicatat dalam laporan keuangan. Pemilihan metode pencatatan yang tepat akan memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan, baik dari segi ketepatan, kelengkapan, maupun relevansinya dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, terdapat dua metode yang umum digunakan, yaitu basis kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*), yang masing-masing memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami metode pencatatan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar guna melihat sejauh mana metode tersebut dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Ibu Nurniati Arifin selaku Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, beliau

⁷⁷ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁷⁸ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

mengatakan bahwa:

“Kalau pencatatan keuangan di sini, kami pakai yang basis kas. Jadi setiap ada uang masuk atau keluar baru dicatat. Kalau belum ada uangnya, biasanya belum dicatat. Soalnya cara ini lebih mudah kami pahami dan lebih gampang dijalankan sehari-hari.”⁷⁹

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau metode pencatatan yang kami pakai itu masih basis kas, jadi dicatat kalau sudah ada uang masuk atau keluar. Kami pilih cara itu karena lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pengurus. Kalau yang akrual itu kami belum pakai, karena masih agak rumit untuk kami jalankan sekarang.”⁸⁰

Sistem pencatatan akuntansi merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan, karena menentukan bagaimana transaksi keuangan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem pencatatan yang umum digunakan, seperti *single entry* dan *double entry*, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tingkat kompleksitas yang berbeda. Pemilihan sistem pencatatan tersebut biasanya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar serta alasan yang mendasari pemilihan sistem tersebut.

Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau pencatatan di sini sebenarnya masih sederhana saja, kami pakai *single entry*. Jadi tiap ada uang masuk atau keluar, ya langsung dicatat. Tidak pakai yang terlalu rumit, karena kami menyesuaikan juga dengan kemampuan yang ada. Yang penting semua pemasukan sama pengeluaran

⁷⁹ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

⁸⁰ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

tetap tercatat.”⁸¹

Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pencatatan, kami memang masih pakai yang sederhana saja, pakai single entry. Jadi fokusnya di catat uang masuk sama keluar. Karena lebih mudah dijalankan oleh pengurus, mengingat semua pengurus tidak memiliki latar belakang di bidang akuntansi.”⁸²

Alur pencatatan transaksi keuangan merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi, karena menggambarkan tahapan proses mulai dari terjadinya transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini mencakup kegiatan pencatatan, pengumpulan bukti transaksi, pengelompokan, hingga penyajian informasi keuangan secara sistematis. Alur pencatatan yang baik akan memudahkan pengurus dalam mengelola keuangan serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana alur pencatatan transaksi keuangan yang diterapkan di BUMDes Kuncup Mekar, mulai dari pencatatan awal hingga penyusunan laporan keuangan.

Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau alur pencatatannya itu biasanya dimulai dari ada transaksi dulu, misalnya ada pemasukan atau pengeluaran. Setiap transaksi itu ada buktinya, seperti nota atau kwitansi. Nah, setelah itu saya catat di buku kas, jadi dicatat uang masuk sama uang keluar. Pencatatannya masih sederhana saja, yang penting semua transaksi tercatat. Nanti dari catatan itu saya rekap lagi, biasanya per bulan, baru dibuatkan laporan keuangan sederhana.”⁸³

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, beliau

⁸¹ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

⁸² Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁸³ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

menyampaikan bahwa:

“Kalau dari alurnya, setelah bendahara mencatat semua transaksi, biasanya direkap dulu baru disusun jadi laporan. Laporan itu nanti saya lihat dan cek, kalau sudah sesuai baru disampaikan ke BPD. Jadi alurnya memang masih sederhana, tapi yang penting pencatatannya tetap berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan.”⁸⁴

Jenis laporan keuangan yang disusun oleh suatu organisasi merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi, karena mencerminkan informasi yang disajikan terkait kondisi keuangan dan kinerja usaha. Setiap jenis laporan keuangan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aktivitas keuangan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua organisasi mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap, karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sistem pencatatan yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes Kuncup Mekar dalam pengelolaan keuangannya, guna menilai sejauh mana laporan yang dihasilkan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku.

Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau laporan keuangan yang kami buat itu ada beberapa yaitu, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas/modal, neraca, sama laporan arus kas. Semua laporan itu dibuat dari pencatatan keuangan yang ada, supaya bisa diketahui kondisi keuangan dan hasil usaha BUMDes”⁸⁵

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Laporan keuangan yang disusun itu ada laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Laporan itu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan untuk

⁸⁴ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁸⁵ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

melihat perkembangan usaha yang dijalankan BUMDes saat ini.”⁸⁶

Berikut merupakan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Kuncup Mekar:

a. Laporan Laba/Rugi

Tabel 4.1 Laporan Laba/Rugi BUMDes Kuncup Mekar

BADAN USAHA MILIK DESA KUNCUP MEKAR LAPORAN LABA/RUGI PER 31 DESEMBER 2025			
I PENDAPATAN			
	Pendapatan Operasional	Rp	88.200.000
	Pendapatan Non Operasional	Rp	73.939
	TOTAL PENDAPATAN	Rp	88.273.939
II BIAYA			
	Biaya Operasional	Rp	45.504.963
	Biaya Non Operasional	Rp	62.787
	TOTAL BIAYA	Rp	45.567.750
	LABA/RUGI BERSIH	Rp	42.706.189

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan BUMDes Kuncup Mekar Tahun 2025

⁸⁶ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

b. Laporan Perubahan Modal/Ekuitas

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Modal/Ekuitas BUMDes Kuncup Mekar

BADAN USAHA MILIK DESA KUNCUP MEKAR
LAPORAN PERUBAHAN MODAL/EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2025

PENYERTAAN MODAL

Penyertaan Modal Desa Awal	Rp 499.516.306
SALDO LABA	
Saldo Laba Ditahan	Rp 14.645.366
Saldo Laba Tahun Lalu/Dividen	Rp 4.914.174
Laba Bersih Periode Berjalan	Rp 42.706.189
Bagi Hasil Penyertaan:	
Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa	Rp 8.541.238
SALDO LABA AKHIR	Rp 53.724.491
EKUITAS AKHIR	Rp 553.240.797

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan BUMDes Kuncup Mekar Tahun 2025

c. Neraca

Tabel 4.3 Neraca BUMDes Kuncup Mekar

BADAN USAHA MILIK DESA KUNCUP MEKAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		UTANG LANCAR	
Kas	Rp 8.869.437	Utang Gaji/Upah Karyawan	Rp 11.534.200
Bank	Rp 124.199.292	Dana Kehormatan & Operasional	Rp 3.178.428
Piutang Kredit Mikro	Rp 344.390.000	Dana Sosial	Rp 267.854
Piutang Dagang	Rp 3.000.000	Total Utang Lancar	Rp 14.980.482
Kas Jasa Penagihan Listrik	Rp 23.000.000	UTANG JANGKA PANJANG	-
Persediaan	Rp 54.642.770	MODAL	
Total Aktiva Lancar	Rp 558.101.499	Modal Desa	Rp 499.516.306
AKTIVA TETAP		Laba Ditahan	Rp 19.559.539
Biaya Dibayar Dimuka	Rp 18.000.000	Laba/Rugi Berjalan	Rp 42.706.189
Nilai Buku Inventaris	Rp 394.163	Total Modal	Rp 561.782.034
Total Aktiva Tetap	Rp 18.394.163		
TOTAL AKTIVA	Rp 576.495.662	TOTAL PASIVA	Rp 576.495.662

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan BUMDes Kuncup Mekar Tahun 2025

d. Laporan Arus Kas

Tabel 4.4 Laporan Arus Kas BUMDes Kuncup Mekar

BADAN USAHA MILIK DESA KUNCUP MEKAR LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2025	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Penerimaan Kas dari Penjualan Barang Dagangan	Rp 311.025.000
Penerimaan Kas dari Bunga Rekening Bank	Rp 73.939
Penerimaan Kas dari Angsuran Pinjaman	Rp 350.721.000
Jumlah Arus Kas Masuk Operasi	Rp 661.819.939
Pengeluaran Kas untuk Pembayaran ke Pemasok Barang	Rp (258.900.000)
Pengeluaran Kas untuk Gaji/Upah Karyawan	Rp (41.090.800)
Pengeluaran Kas untuk Pajak Rekening Bank	Rp (62.787)
Pengeluaran Kas untuk Pinjaman	Rp(302.500.000)
Pengeluaran Kas untuk untuk Beban Lain-lain	Rp (4.020.000)
Jumlah Arus Kas Keluar Operasi	Rp(606.573.587)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 55.246.352
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-
Kenaikan Kas Tahun Berjalan	Rp 55.246.352
Saldo Kas Awal Tahun	Rp 93.946.677
Saldo Kas Akhir Tahun	Rp 149.193.029

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan BUMDes Kuncup Mekar Tahun 2025

2. Kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga usaha, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu usaha, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun dalam praktiknya, penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai kendala seringkali dihadapi oleh pengelola usaha, terutama pada lembaga usaha yang pengelolanya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Kondisi ini terjadi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), termasuk pada BUMDes Kuncup Mekar. Sebagai lembaga usaha milik desa, BUMDes Kuncup Mekar menjalankan berbagai kegiatan usaha yang tentunya melibatkan transaksi keuangan yang perlu dicatat dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Namun dalam proses penyajiannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengelola BUMDes Kuncup Mekar dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, untuk mengetahui kendala tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pengelola BUMDes Kuncup Mekar yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, diketahui bahwa salah satu kendala dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi adalah keterbatasan pemahaman mengenai akuntansi. Beliau menyampaikan:

“Kalau kendala yang kami hadapi itu sebenarnya lebih ke soal standar akuntansi, karena terus terang saya sendiri tidak punya latar belakang pendidikan akuntansi. Jadi kadang masih bingung bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang benar sesuai standar yang ada. Selama ini kami biasanya cuma mencatat pemasukan sama pengeluaran secara sederhana saja supaya uang yang masuk dan keluar tetap jelas. Jadi untuk menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap sesuai standar akuntansi memang masih agak sulit dipahami.”⁸⁷

⁸⁷ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, yang menyatakan bahwa:

“Kalau kendala di BUMDes itu memang lebih ke soal akuntansi, karena terus terang kami di pengurus ini tidak semua punya latar belakang akuntansi. Jadi waktu menyusun laporan keuangan sesuai standar itu kadang masih agak bingung. Selama ini pencatatan keuangan tetap kami lakukan, tapi masih sederhana saja, seperti catat pemasukan sama pengeluaran. Jadi untuk menyusun laporan yang sesuai standar akuntansi itu memang masih agak susah kami pahami.”⁸⁸

Selanjutnya, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Gustiah, juga menyampaikan bahwa:

“Kalau dari saya, kendalanya memang karena kami tidak punya dasar akuntansi, jadi kadang masih bingung juga bagaimana cara bikin laporan keuangan yang sesuai standar. Biasanya kami cuma bantu catat yang masuk sama yang keluar saja. Kalau sudah harus sesuai dengan standar akuntansi itu, masih agak sulit dipahami karena memang bukan bidang kami.”⁸⁹

Selain itu, Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, juga menyampaikan bahwa:

“Kendala utamanya memang di pemahaman akuntansi dari pengurus BUMDes. Karena mereka bukan dari latar belakang akuntansi, jadi untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar itu masih agak kesulitan. Pencatatan yang dilakukan sudah ada, tapi masih sederhana saja, jadi belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.”⁹⁰

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan suatu organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Kemampuan pengurus dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat mempengaruhi kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya

⁸⁸ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁸⁹ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁹⁰ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

manusia yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai di bidang akuntansi agar laporan keuangan dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak semua pengurus BUMDes memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang akuntansi. Kondisi ini juga ditemukan pada BUMDes Kuncup, di mana masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, diketahui bahwa kemampuan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih terbatas. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau soal kemampuan, memang kami masih terbatas, karena jujur saja kami tidak punya latar belakang akuntansi. Jadi untuk pencatatan keuangan itu biasanya kami lakukan semampunya saja, yang penting pemasukan sama pengeluaran tercatat. Tapi kalau untuk menyusun laporan keuangan yang lebih lengkap, itu memang masih agak susah bagi kami.”⁹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari sisi pengurus, memang kemampuan di bidang akuntansi itu masih terbatas. Jadi untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan itu belum bisa dilakukan secara maksimal. Selama ini kami tetap berusaha mencatat keuangan, tapi memang masih sederhana saja.”⁹²

Selanjutnya, Ibu Gustiah selaku Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, juga menyampaikan bahwa:

“Kalau kemampuan memang kami masih terbatas, apalagi dalam hal pencatatan keuangan yang sesuai dengan aturan. Jadi yang kami lakukan selama ini hanya sebatas membantu pencatatan saja, belum sampai ke penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.”⁹³

⁹¹ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

⁹² Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁹³ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau saya lihat, memang kemampuan pengurus dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan masih terbatas. Jadi laporan keuangan yang dibuat masih sederhana dan belum sesuai dengan standar yang seharusnya.”⁹⁴

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana pendukung, serta adanya pelatihan dan pendampingan yang memadai. Sarana seperti perangkat pencatatan, buku administrasi, maupun penggunaan sistem atau aplikasi akuntansi dapat membantu mempermudah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pelatihan dan pendampingan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan secara lebih profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ketersediaan sarana, pelatihan, dan pendampingan menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pelatihan, pengurus diharapkan mampu memahami konsep dasar akuntansi serta dapat menerapkannya dalam praktik pencatatan keuangan. Sementara itu, pendampingan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan dapat diimplementasikan secara tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua BUMDes mendapatkan dukungan sarana, pelatihan, dan pendampingan yang optimal.

Februari 2026.

⁹⁴ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

Kondisi tersebut juga terjadi pada BUMDes Kuncup Mekar, di mana keterbatasan sarana serta belum optimalnya pelatihan dan pendampingan memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun pengurus BUMDes Kuncup Mekar telah mengikuti beberapa pelatihan, namun dalam penerapannya masih mengalami kesulitan, sehingga laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, diketahui bahwa keterbatasan sarana, pelatihan, dan pendampingan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dari segi sarana sama pelatihan, sebenarnya kami sudah pernah ikut pelatihan, tapi jujur saja masih belum terlalu paham bagaimana cara menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kami di sini biasanya tetap mencatat keuangan dengan cara sederhana saja. Kadang juga karena tidak ada pendampingan yang rutin, kami jadi bingung bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang benar sesuai standar.”⁹⁵

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, yang menyampaikan bahwa:

“Kalau saya sendiri belum pernah ikut pelatihan tentang akuntansi atau laporan keuangan, jadi memang masih kurang paham juga bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Selama ini kami hanya mengandalkan pencatatan sederhana saja sesuai kemampuan yang ada.”⁹⁶

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Gustiah selaku Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya juga belum pernah ikut pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan, jadi memang masih kurang paham juga. Selama ini saya hanya membantu pencatatan saja yang penting-penting, belum sampai menyusun laporan sesuai standar.”⁹⁷

⁹⁵ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

⁹⁶ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁹⁷ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

Selain itu, Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, juga menyampaikan bahwa:

“Kalau saya lihat, memang ada yang sudah ikut pelatihan, tapi ada juga yang belum. Jadi pemahaman pengurus itu tidak merata. Makanya dalam penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai standar, karena masih terbatas pengetahuan dan belum ada pendampingan lanjutan.”⁹⁸

Dalam pengelolaan keuangan, penggunaan sistem atau aplikasi akuntansi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem yang terstruktur, proses pencatatan dapat dilakukan secara lebih sistematis, akurat, dan efisien dibandingkan dengan pencatatan manual. Selain itu, penggunaan aplikasi juga dapat membantu meminimalisir kesalahan serta mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, dalam praktiknya tidak semua BUMDes langsung menggunakan sistem atau aplikasi dalam pencatatan keuangan. Sebagian masih menggunakan pencatatan secara manual sebelum beralih ke sistem yang lebih modern. Kondisi ini juga terjadi pada BUMDes Kuncup Mekar, yang sebelumnya melakukan pencatatan secara manual, kemudian mulai menggunakan aplikasi pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dulu kami mencatat keuangan masih manual, pakai buku saja. Tapi mulai tahun 2024 kami sudah pakai aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan). Cuma walaupun sudah pakai aplikasi, kami masih dalam tahap belajar, jadi belum terlalu lancar juga penggunaannya.”⁹⁹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

⁹⁸ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

⁹⁹ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

“Memang dulu pencatatan masih manual, tapi sekarang sudah mulai pakai aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sejak tahun 2024. Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, pencatatan keuangan bisa lebih rapi, walaupun memang pengurus masih perlu penyesuaian dalam penggunaannya.”¹⁰⁰

Selanjutnya, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Gustiah, juga menyampaikan bahwa:

“Iya, dulu memang masih manual, sekarang sudah pakai aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan). Tapi kami juga masih belajar, jadi belum sepenuhnya paham cara penggunaannya.”¹⁰¹

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau saya lihat, memang dulu masih manual, tapi sekarang sudah pakai aplikasi. Itu sudah bagus, tapi memang pengurus masih perlu belajar lagi supaya bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi tersebut.”¹⁰²

3. Solusi dalam menghadapi kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi merupakan hal yang penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, termasuk pada BUMDes. Laporan keuangan yang disusun dengan baik akan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang masih menghadapi berbagai kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, baik dari segi keterbatasan

¹⁰⁰ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹⁰¹ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹⁰² Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, maupun dukungan sarana dan prasarana.

Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Solusi tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan pengurus, tetapi juga melibatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah desa dan lembaga pengawas. Kondisi tersebut juga terjadi pada BUMDes Kuncup Mekar yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi solusi yang dapat dilakukan guna mengatasi kendala tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes Kuncup Mekar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, yang paling dibutuhkan itu pendampingan yang rutin sama pelatihan. Soalnya selama ini walaupun sudah pernah ikut pelatihan, tapi masih belum terlalu paham cara menerapkannya. Jadi kalau ada yang bisa dampingi langsung, mungkin kami lebih cepat mengerti dan bisa susun laporan keuangan sesuai standar.”¹⁰³

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, menyampaikan bahwa:

“Kalau dari saya, solusi yang paling dibutuhkan itu pelatihan yang lebih mendalam sama pendampingan lanjutan. Karena selama ini pengurus belum semua paham akuntansi, jadi perlu dibimbing terus supaya bisa menyusun laporan keuangan dengan benar sesuai aturan.”¹⁰⁴

Ibu Gustiah selaku Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, beliau

¹⁰³ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

¹⁰⁴ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, yang penting itu ada pelatihan juga untuk semua pengurus, jangan cuma sebagian saja. Karena selama ini kami belum pernah ikut pelatihan, jadi masih kurang paham. Kalau ada pelatihan dan pendampingan, mungkin kami bisa lebih mengerti cara menyusun laporan keuangan yang sesuai standar.”¹⁰⁵

Selain itu, Bapak Rudi Tompong selaku Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, solusi yang paling dibutuhkan itu memang peningkatan kapasitas pengurus, seperti pelatihan sama pendampingan yang dilakukan secara rutin, bukan cuma sekali saja. Soalnya kalau cuma sekali pelatihan, biasanya pengurus masih belum terlalu paham, apalagi kalau tidak langsung dipraktikkan. Jadi menurut saya, pendampingan itu penting supaya mereka bisa langsung dibimbing waktu menyusun laporan keuangan.”¹⁰⁶

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Menurut saya, yang paling dibutuhkan itu pendampingan yang berkelanjutan sama pelatihan. Karena walaupun sudah ada pelatihan, tapi kalau tidak didampingi, pengurus masih susah menerapkannya. Jadi harus ada pembinaan terus supaya laporan keuangan bisa sesuai standar.”¹⁰⁷

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya pada BUMDes. Laporan keuangan yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak semua BUMDes mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku karena masih adanya berbagai kendala,

¹⁰⁵ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹⁰⁶ Rudi Tompong, Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹⁰⁷ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

seperti keterbatasan pemahaman pengurus, kurangnya pengalaman dalam pencatatan, serta belum optimalnya pelatihan dan pendampingan yang diterima.

Oleh karena itu, tidak hanya diperlukan pemahaman terhadap kendala yang dihadapi, tetapi juga penting untuk mengetahui upaya atau strategi yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam mengatasi kendala tersebut. Upaya ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan agar dapat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, keberhasilan upaya tersebut juga sangat dipengaruhi oleh peran aktif pengurus, dukungan pemerintah desa, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan.

Kondisi tersebut juga dialami oleh BUMDes Kuncup Mekar, yang masih menghadapi berbagai kendala dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi upaya atau strategi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan BUMDes Kuncup Mekar, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas upaya yang telah diterapkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu ikut bimtek, tapi memang tidak terlalu sering diadakan. Jadi kadang materi yang didapat masih belum terlalu dipahami, apalagi kalau tidak diulang-ulang.”¹⁰⁸

Selanjutnya, Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, juga menyampaikan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu ikut bimtek, tapi tidak rutin. Jadi pemahaman pengurus juga belum maksimal karena kegiatannya jarang dilakukan.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Gustiah selaku Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu ikut bimtek, tapi jarang dilakukan. Jadi kami masih banyak belajar sendiri karena belum terlalu paham dari bimtek yang pernah diikuti.”¹¹⁰

Selain itu, Bapak Rudi Tompong selaku Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar, juga menyampaikan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu mendorong pengurus untuk ikut bimtek, tapi memang kegiatannya tidak terlalu sering. Jadi pemahaman pengurus masih perlu ditingkatkan lagi.”¹¹¹

Hal ini juga diperkuat dengan Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan yaitu ikut bimtek, tapi belum dilakukan secara rutin. Jadi pengurus masih belum terlalu paham sepenuhnya karena kurangnya kegiatan yang berkelanjutan.”¹¹²

Salah satu solusi utama dalam mengatasi kendala penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar adalah melalui peningkatan kapasitas pengurus, khususnya melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Namun demikian, upaya peningkatan kapasitas tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes semata, melainkan juga memerlukan dukungan dari pihak eksternal, khususnya pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes. Dukungan

¹⁰⁹ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹⁰ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹¹ Rudi Tompong, Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹² Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

tersebut dapat berupa pembinaan, pelatihan, maupun pendampingan yang bertujuan untuk membantu pengurus dalam memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, atau pendampingan kepada pengurus BUMDes dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan dapat diatasi secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Rudi Tompong, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dari desa, memang ada dukungan seperti pembinaan sama bimtek, tapi belum terlalu sering dilakukan. Jadi pengurus sudah pernah dapat arahan, tapi memang masih perlu ditingkatkan lagi supaya mereka bisa lebih paham.”¹¹³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya lihat, memang ada dukungan dari desa seperti pembinaan dan bimtek, tapi belum rutin. Jadi pengurus masih belum terlalu paham sepenuhnya karena kurangnya kegiatan yang terus-menerus.”¹¹⁴

Selain itu, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau dari desa, memang pernah ada pembinaan sama bimtek, tapi tidak sering. Jadi kami masih belum terlalu paham karena kegiatan seperti itu jarang dilakukan.”¹¹⁵

Selanjutnya, Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, mengatakan bahwa:

¹¹³ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹⁴ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹⁵ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

“Kalau dari desa, memang ada dukungan seperti pembinaan, tapi belum rutin dilakukan. Jadi pengurus masih perlu banyak belajar lagi supaya bisa lebih paham.”¹¹⁶

Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Gustiah, juga menyampaikan bahwa:

“Kalau menurut saya, memang ada dukungan dari desa seperti pembinaan dan bimtek, tapi jarang dilakukan. Jadi kami masih belum terlalu paham karena belum sering ikut kegiatan seperti itu.”¹¹⁷

4. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang baik, termasuk dalam pengelolaan BUMDes. Transparansi dalam pengelolaan keuangan mencerminkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pengelola dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana secara jelas dan dapat dipercaya. Kedua prinsip ini menjadi sangat penting karena BUMDes mengelola dana yang bersumber dari desa dan masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis pengurus dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya sistem pengawasan yang berjalan dengan baik. Pengawasan merupakan salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. Dalam konteks

¹¹⁶ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹¹⁷ Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

pemerintahan desa, peran pengawasan ini umumnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan BUMDes.

Selain itu, keterbukaan pengurus dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak terkait juga menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang baik. Komunikasi yang terbuka antara pengurus BUMDes dan pihak pengawas akan memudahkan proses evaluasi serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan serta bagaimana bentuk keterbukaan pengurus dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Kondisi tersebut juga relevan pada BUMDes Kuncup Mekar. Sebagai salah satu BUMDes yang menjalankan kegiatan usaha desa, BUMDes Kuncup Mekar tentunya juga dihadapkan pada tuntutan untuk mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menggali informasi terkait bagaimana proses pengawasan yang dilakukan serta bagaimana keterbukaan pengurus dalam menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan.

Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau dari BPD, biasanya kami minta laporan keuangan BUMDes secara berkala terus kami cek. Kadang juga dibahas di rapat desa, jadi pengurus jelaskan langsung pemasukan sama pengeluarannya. Kalau ada yang kurang jelas, kami tanyakan. Agar laporan keuangan yang dibuat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.”¹¹⁸

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, beliau

¹¹⁸ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

menyampaikan bahwa:

“Kalau dari kami, biasanya laporan keuangan disusun sama bendahara, terus kami sampaikan ke BPD secara berkala. Nanti BPD cek dan kalau ada yang kurang jelas, mereka tanya langsung ke kami, biasanya dibahas juga di rapat desa. Jadi kami terbuka saja soal keuangan BUMDes.”¹¹⁹

Selain itu, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya sebagai bendahara, tugasnya mencatat semua pemasukan sama pengeluaran, terus dibuatkan laporan. Setelah itu dilaporkan ke direktur dan diserahkan ke BPD. Nanti dari BPD biasanya dicek, kalau ada yang kurang jelas mereka tanyakan, lalu dijelaskan sesuai catatan yang ada.”¹²⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Melalui pengawasan tersebut, laporan keuangan yang disusun oleh pengurus tidak hanya disampaikan, tetapi juga ditelaah untuk memastikan kejelasan dan kebenarannya. Namun, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya proses pemeriksaan, melainkan juga dipengaruhi oleh intensitas atau seberapa sering kegiatan evaluasi tersebut dilakukan.

Semakin sering evaluasi dilakukan, maka semakin besar peluang untuk mendeteksi kesalahan, memberikan masukan, serta melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebaliknya, apabila evaluasi dilakukan secara tidak rutin, maka pengawasan yang dilakukan cenderung kurang optimal dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, frekuensi evaluasi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem pengawasan keuangan BUMDes. Dengan demikian, penting untuk mengetahui seberapa sering BPD melakukan evaluasi atau penelaahan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes Kuncup Mekar. Hal ini bertujuan

¹¹⁹ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹²⁰ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

untuk melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya saya melakukan evaluasi itu setiap ada laporan yang masuk. Biasa juga dibahas di rapat desa, jadi tidak tentu waktunya, tergantung kapan laporan disampaikan oleh pengurus.”¹²¹

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, menyampaikan bahwa:

“Kalau evaluasi dari BPD itu biasanya dilakukan setiap kami laporkan keuangan, tapi memang tidak ada jadwal tetap. Jadi kalau ada laporan, baru dicek sama BPD.”¹²²

Selain itu, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, Ibu Nurniati Arifin, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk evaluasi, biasanya dilakukan setiap kali kami buat laporan dan serahkan ke BPD, tapi memang tidak rutin, tergantung dari laporan yang kami buat.”¹²³

Pengawasan terhadap laporan keuangan BUMDes telah dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meskipun pelaksanaannya masih bergantung pada waktu penyampaian laporan oleh pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering evaluasi dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana hubungan dan kerja sama antar pihak yang terlibat dalam proses pengawasan tersebut.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan melibatkan beberapa unsur penting, seperti pemerintah desa, BPD, dan pengurus BUMDes itu sendiri. Ketiga pihak

¹²¹ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹²² Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹²³ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

ini memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang baik agar proses pengawasan dapat berjalan secara efektif. Koordinasi yang dimaksud mencakup komunikasi, penyampaian informasi, serta pelaksanaan evaluasi secara bersama-sama guna memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.

Apabila koordinasi antar pihak berjalan dengan baik, maka proses pengawasan akan menjadi lebih terarah dan sistematis. Sebaliknya, apabila koordinasi kurang optimal, maka dapat menghambat efektivitas pengawasan serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, koordinasi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam mendukung pengawasan terhadap laporan keuangan BUMDes. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan BUMDes dalam melakukan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan.

Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, menyampaikan bahwa:

“Kalau koordinasi biasanya dilakukan lewat rapat desa. Di situ pengurus BUMDes jelaskan laporan keuangan, terus dari pemerintah desa sama BPD ikut mendengarkan dan kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan.”¹²⁴

Selanjutnya, Bapak Bustaman selaku Direktur BUMDes Kuncup Mekar, mengatakan bahwa:

“Kalau koordinasi biasanya kami sampaikan laporan keuangan ke pemerintah desa sama BPD, nanti kalau ada yang perlu dibahas, kami ikut rapat desa untuk jelaskan lebih lanjut.”¹²⁵

Selain itu, Ibu Nurniati Arifin selaku Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, menyampaikan bahwa:

¹²⁴ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹²⁵ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

“Kalau koordinasi biasanya kami ikut rapat kalau ada pembahasan soal laporan keuangan. Jadi kami jelaskan sesuai catatan yang ada kalau ada yang ditanyakan.”¹²⁶

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Bapak Rudi Tompong selaku Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau koordinasi, biasanya memang lewat rapat desa atau komunikasi langsung kalau ada hal yang perlu dibahas.”¹²⁷

Pengawasan terhadap laporan keuangan BUMDes dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari proses evaluasi laporan keuangan hingga koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengurus BUMDes. Pengawasan tersebut memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya proses evaluasi dan koordinasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana tindak lanjut yang dilakukan ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kelemahan dalam laporan keuangan. Tindak lanjut merupakan bagian penting dalam proses pengawasan, karena melalui tindakan tersebut dapat diketahui sejauh mana hasil evaluasi benar-benar digunakan untuk melakukan perbaikan. Tanpa adanya tindak lanjut yang jelas, maka proses pengawasan yang dilakukan berpotensi menjadi kurang optimal dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes, ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dapat berupa kesalahan pencatatan, kurangnya kelengkapan data,

¹²⁶ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

¹²⁷ Rudi Tompong, Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

maupun ketidaksesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, peran BPD sebagai lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap temuan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti secara tepat.

Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau jujur dari kami di BPD, sebenarnya kami juga belum terlalu paham soal laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Jadi kalau kami periksa laporan BUMDes, paling kami lihat secara umum saja, seperti pemasukan sama pengeluaran. Kalau ada yang kurang jelas, kami tanya ke pengurus. Tapi untuk memastikan itu sudah sesuai standar atau belum, kami juga masih belum terlalu mengerti.”¹²⁸

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, menyampaikan bahwa:

“Kalau dari kami, laporan keuangan memang sudah dibuat sama bendahara, terus kami sampaikan ke BPD. Tapi memang kami juga belum terlalu paham soal standar akuntansi, jadi yang penting laporan itu ada pemasukan sama pengeluaran. Kalau dari BPD ada yang ditanya atau disuruh perbaiki, kami ikuti saja sesuai arahan mereka.”¹²⁹

Selain itu, Ibu Nurniati Arifin selaku Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, mengatakan bahwa:

“Kalau saya, biasanya cuma mencatat pemasukan sama pengeluaran saja sesuai yang terjadi. Terus saya buat laporan sederhana. Tapi kalau soal standar akuntansi yang sebenarnya, saya juga masih belum terlalu paham, jadi laporan yang dibuat itu masih seadanya sesuai yang saya mengerti.”¹³⁰

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan BUMDes melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti evaluasi laporan, koordinasi dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes, serta tindak lanjut atas temuan yang ada. Pengawasan

¹²⁸ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹²⁹ Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹³⁰ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, keberadaan pengawasan saja belum cukup untuk menjamin tercapainya pengelolaan keuangan yang baik. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pengawasan tersebut memberikan dampak atau kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, perlu dilihat apakah pengawasan yang dilakukan benar-benar mampu mendorong pengurus untuk menyusun laporan keuangan secara lebih baik, lebih terbuka, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi pengawasan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti adanya perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan, meningkatnya keterbukaan informasi keuangan, serta adanya kesadaran pengurus dalam menjalankan prinsip akuntabilitas. Apabila pengawasan berjalan secara efektif, maka akan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara bertahap. Sebaliknya, apabila pengawasan belum berjalan optimal, maka kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga akan terbatas.

Selain itu, tingkat kontribusi pengawasan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti intensitas evaluasi, kualitas koordinasi antar pihak, serta pemahaman pengelola dan pengawas terhadap standar akuntansi. Keterbatasan dalam aspek-aspek tersebut dapat menjadi hambatan dalam memaksimalkan peran pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dengan demikian, penting untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh BPD berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes.

Bapak Danial selaku Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar, menyampaikan bahwa:

“Kalau menurut saya, pengawasan yang kami lakukan itu ada pengaruhnya, karena setiap laporan yang masuk pasti kami cek dan kalau ada yang kurang jelas kami tanya. Jadi pengurus juga jadi lebih terbuka.

Tapi memang belum terlalu maksimal, karena kami juga masih terbatas pemahaman soal laporan keuangan.”¹³¹

Selanjutnya, Direktur BUMDes Kuncup Mekar, Bapak Bustaman, mengatakan bahwa:

“Kalau dari kami, dengan adanya pengawasan dari BPD, kami jadi lebih hati-hati dalam buat laporan dan lebih terbuka. Tapi memang untuk perbaikan sesuai standar akuntansi, masih belum terlalu maksimal.”¹³²

Selain itu, Ibu Nurniati Arifin selaku Bendahara BUMDes Kuncup Mekar, menyampaikan bahwa:

“Kalau ada pengawasan dari BPD, kami jadi lebih teliti dalam mencatat dan membuat laporan. Tapi memang masih sederhana, belum sesuai dengan standar yang sebenarnya.”¹³³

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti membahas hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan mengenai implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian serta mengaitkannya dengan teori dan konsep yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Implementasi sistem pencatatan akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap

Implementasi sistem pencatatan akuntansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Melalui sistem pencatatan yang baik, setiap transaksi keuangan dapat dicatat secara teratur, jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada BUMDes Kuncup Mekar, penerapan

¹³¹ Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹³² Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.

¹³³ Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.

sistem pencatatan akuntansi dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mudah dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, implementasi sistem pencatatan akuntansi menjadi hal yang penting untuk diketahui guna melihat bagaimana proses pencatatan keuangan yang diterapkan dalam kegiatan operasional BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar telah mengalami pergeseran dari sistem manual menuju sistem berbasis aplikasi melalui penggunaan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sejak tahun 2024. Meskipun perubahan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam meningkatkan kerapian dan keteraturan pencatatan keuangan, namun secara substansial implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan sistem akuntansi yang terstruktur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kemampuan pengurus dalam mengoperasikan aplikasi, sehingga penggunaan teknologi cenderung bersifat administratif, belum sampai pada pemanfaatan yang optimal dalam menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada ketersediaan sistem atau teknologi, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Akibatnya, kualitas pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan masih berpotensi belum akurat dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, implementasi sistem pencatatan akuntansi di BUMDes Kuncup Mekar dapat dikatakan masih berada pada tahap transisi dan belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, agar pengurus tidak hanya mampu menggunakan aplikasi secara teknis, tetapi juga memahami prinsip-prinsip akuntansi secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai

dengan standar yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel tidak hanya memerlukan sistem pencatatan yang baik, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai.¹³⁴ Selain itu, menurut Halim, kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.¹³⁵ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk pelatihan dan pendampingan, agar pengurus tidak hanya mampu menggunakan aplikasi secara teknis, tetapi juga memahami prinsip-prinsip akuntansi secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Metode pencatatan akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar masih menggunakan basis kas (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Meskipun metode ini memberikan kemudahan dalam penerapan dan sesuai dengan kemampuan pengurus, namun secara substansial metode tersebut belum mampu menghasilkan informasi keuangan yang lengkap dan mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mengarah pada penerapan prinsip akuntansi yang lebih komprehensif.

Selain itu, penggunaan metode basis kas juga mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap metode akuntansi yang lebih kompleks, seperti basis akrual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian informasi keuangan, terutama dalam pengakuan transaksi yang belum melibatkan arus kas. Hal ini sejalan dengan pendapat

¹³⁴ Mardiasmo, *OTONOMI & MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

¹³⁵ Hartoto, Arifah Fibri Andriani, and Nina Andriana, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (TEORI DAN PRAKTIK)* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025).

Mardiasmo, yang menyatakan bahwa basis kas hanya mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan sehingga memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Selain itu, menurut Halim, basis akrual dinilai lebih mampu menyajikan informasi keuangan secara lengkap karena mencatat seluruh transaksi yang terjadi, baik yang sudah maupun yang belum melibatkan arus kas. Implementasi metode pencatatan akuntansi di BUMDes Kuncup Mekar masih berada pada tahap dasar dan belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan agar ke depan metode pencatatan yang digunakan dapat lebih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BUMDes Kuncup Mekar telah menyusun beberapa jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Penyusunan laporan tersebut menunjukkan adanya upaya BUMDes dalam menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan terstruktur. Namun demikian, dapat dipahami bahwa kelengkapan laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh penerapan sistem akuntansi yang memadai, karena proses pencatatannya masih dilakukan secara sederhana dan belum melalui tahapan akuntansi yang lengkap seperti jurnal dan buku besar.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara bentuk laporan keuangan yang dihasilkan dengan sistem pencatatan yang diterapkan. Secara teoritis, laporan keuangan seperti neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas umumnya dihasilkan melalui sistem *double entry* yang didukung oleh siklus akuntansi lengkap. Akan tetapi, pada praktiknya BUMDes Kuncup Mekar masih menggunakan pencatatan sederhana yang berfokus pada kas masuk dan kas keluar. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disusun kemungkinan besar masih berbasis rekapitulasi data keuangan sederhana dan

belum sepenuhnya mencerminkan proses akuntansi yang sistematis.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, meskipun jenis laporan yang disusun oleh BUMDes Kuncup Mekar sudah cukup lengkap, namun kualitas penyajiannya masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, implementasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Berikut merupakan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Kuncup Mekar:

a. Laporan Laba/Rugi

Laporan laba/rugi (*income statement*) merupakan salah satu laporan keuangan utama yang berfungsi untuk menyajikan data operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu melalui penyajian pendapatan, beban, dan laba (atau rugi) yang dihasilkan.¹³⁶ Berdasarkan Tabel 4.1 laporan laba/rugi yang dibuat oleh BUMDes Kuncup Mekar yang memiliki perkiraan akun terdiri dari:

1. Pendapatan (*Revenue*)

Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk atau penambahan manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan usaha suatu entitas, baik dari penjualan barang maupun jasa dalam suatu periode tertentu.¹³⁷ Pendapatan menjadi salah satu unsur penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan kemampuan usaha dalam menghasilkan pemasukan dari aktivitas operasional yang dijalankan. Informasi mengenai pendapatan yang disajikan dalam laporan laba rugi dapat digunakan untuk menilai tingkat kinerja dan keberhasilan usaha dalam mencapai tujuan operasional serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

¹³⁶ Ani Nuraini, *MANAJEMEN KEUANGAN: PRINSIP & KEBIJAKAN* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025).

¹³⁷ Nurafni Oktaviah, Tarinih, and Yulia Yunita Yusuf, *TEORI AKUNTANSI Konsep, Regulasi, Dan Isu Kontemporer* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2026).

Berdasarkan laporan laba/rugi BUMDes Kuncup Mekar per 31 Desember 2025, dapat diketahui bahwa total pendapatan yang diperoleh BUMDes Kuncup Mekar sebesar Rp 88.273.939. Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan operasional sebesar Rp 88.200.000 dan pendapatan non operasional sebesar Rp 73.939.

Pendapatan operasional merupakan sumber pendapatan utama BUMDes yang berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan secara langsung. Besarnya nilai pendapatan operasional menunjukkan bahwa aktivitas usaha BUMDes Kuncup Mekar berjalan cukup baik dan mampu memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan usaha. Tingginya pendapatan operasional dibandingkan pendapatan non operasional juga menunjukkan bahwa BUMDes Kuncup Mekar lebih mengandalkan hasil usaha utama dibandingkan pendapatan di luar kegiatan usaha.

Sementara itu, pendapatan non operasional hanya sebesar Rp 73.939, sehingga kontribusinya terhadap total pendapatan tergolong sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan di luar kegiatan utama usaha, seperti bunga bank atau pendapatan lainnya, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan pendapatan BUMDes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pendapatan BUMDes Kuncup Mekar pada tahun 2025 didominasi oleh pendapatan operasional, sehingga keberlangsungan dan peningkatan usaha utama sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan BUMDes secara keseluruhan.

2. Biaya

Biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran kas atau setara kas, maupun kewajiban yang timbul untuk memperoleh manfaat atau pendapatan di masa mendatang. Sementara itu, akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian informasi biaya dalam bentuk laporan keuangan. Informasi biaya tersebut digunakan sebagai dasar bagi manajemen

dalam melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan.¹³⁸

Berdasarkan laporan laba/rugi BUMDes Kuncup Mekar per 31 Desember 2025, diketahui bahwa total biaya yang dikeluarkan BUMDes Kuncup Mekar sebesar Rp 45.567.750. Total biaya tersebut terdiri atas biaya operasional sebesar Rp 45.504.963 dan biaya non operasional sebesar Rp 62.787.

Biaya operasional merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan oleh BUMDes Kuncup Mekar dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Besarnya biaya operasional menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran digunakan untuk mendukung aktivitas usaha agar tetap berjalan dengan baik. Pengeluaran tersebut dapat berupa biaya kebutuhan usaha, pembayaran operasional, maupun biaya lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama BUMDes Kuncup Mekar.

Sementara itu, biaya non operasional hanya sebesar Rp 62.787, sehingga jumlahnya relatif kecil dibandingkan biaya operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran di luar kegiatan utama usaha tidak terlalu mempengaruhi total biaya yang dikeluarkan oleh BUMDes Kuncup Mekar. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya pada BUMDes Kuncup Mekar lebih banyak difokuskan pada kebutuhan operasional usaha. Meskipun biaya operasional cukup besar, namun pendapatan yang diperoleh masih lebih tinggi dibandingkan total biaya, sehingga BUMDes Kuncup Mekar tetap memperoleh laba bersih pada tahun 2025.

b. Laporan Perubahan Modal/Ekuitas

Laporan perubahan modal (*ekuitas*) merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal yang dimiliki suatu entitas dalam periode tertentu. Perubahan modal tersebut dapat terjadi karena adanya laba atau rugi usaha, penambahan investasi modal, maupun pengambilan modal oleh pemilik. Laporan perubahan modal bertujuan untuk memberikan informasi mengenai

¹³⁸ Dheri Febiyani Lestari et al., *AKUNTANSI BIAYA* (Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025).

peningkatan atau penurunan modal selama periode berjalan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan modal meliputi modal awal, laba atau rugi, prive/pengambilan modal, serta penambahan modal.¹³⁹

Berdasarkan tabel 4.2 Laporan Perubahan Modal/Ekuitas BUMDes Kuncup Mekar per 31 Desember 2025, dapat diketahui bahwa BUMDes Kuncup Mekar memiliki penyertaan modal desa awal sebesar Rp499.516.306 yang menjadi sumber utama permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat saldo laba ditahan sebesar Rp14.645.366 yang menunjukkan adanya akumulasi keuntungan dari periode sebelumnya yang tidak dibagikan dan tetap digunakan untuk mendukung operasional usaha. Pada laporan juga tercatat saldo laba tahun lalu/dividen sebesar Rp4.914.174, yang mengindikasikan adanya pembagian atau alokasi laba dari periode sebelumnya.

Selama tahun berjalan, BUMDes Kuncup Mekar berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp42.706.189, yang menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan mampu menghasilkan keuntungan secara optimal. Dari hasil usaha tersebut, terdapat bagi hasil penyertaan modal desa sebesar Rp8.541.238 sebagai bentuk kontribusi keuntungan kepada desa selaku penyerta modal. Setelah memperhitungkan seluruh komponen tersebut, diperoleh saldo laba akhir sebesar Rp53.724.491 yang mencerminkan akumulasi laba pada akhir periode. Dengan demikian, ekuitas akhir BUMDes Kuncup Mekar tercatat sebesar Rp553.240.797, meningkat dibandingkan modal awal. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan BUMDes Kuncup Mekar pada tahun 2025 berada dalam keadaan baik, dengan pertumbuhan modal yang positif dan kemampuan menghasilkan laba yang mendukung keberlanjutan usaha di masa mendatang.

c. Neraca

Neraca (*balance sheet*) merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pada periode

¹³⁹ Heni Dwi Lestari et al., *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH* (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025).

tertentu. Neraca bertujuan untuk menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh entitas sebagai dasar dalam menilai kondisi keuangan serta kemampuan usaha dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.¹⁴⁰ Informasi yang terdapat dalam neraca juga dapat digunakan untuk mengetahui keseimbangan antara sumber daya yang dimiliki dengan kewajiban dan modal yang dimiliki entitas. Berdasarkan tabel 4.3 neraca yang dibuat oleh BUMDes Kuncup Mekar yang terdiri dari Aktiva dan Pasiva sebagai berikut:

1. Aktiva

Aset (Harta) atau aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu entitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.¹⁴¹ Aset menjadi salah satu unsur penting dalam laporan keuangan karena menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nilai aset dapat mengalami perubahan seiring dengan aktivitas usaha, baik bertambah maupun berkurang. Pengurangan nilai aset umumnya terjadi akibat penggunaan secara terus-menerus yang menyebabkan penyusutan atau depresiasi pada aset tetap. Berdasarkan tabel 4.3 neraca BUMDes Kuncup Mekar per 31 Desember 2025, pada sisi aktiva dapat dilihat bahwa total aktiva yang dimiliki BUMDes sebesar Rp576.495.662. Aktiva tersebut terbagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Adapun akun-akun yang terdapat pada aktiva BUMDes Kuncup Mekar terdiri dari:

- a) Aktiva Lancar (*Current Asset*) merupakan harta atau kekayaan perusahaan bersifat lancar, memiliki likuiditas tinggi atau mudah dicairkan. Dengan kata lain, harta lancar dapat dikonversikan (dicairkan) ke dalam mata uang secara

¹⁴⁰ Muhammad Rinaldi et al., *PENGANTAR AKUNTANSI (Pendekatan Siklus Akuntansi)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁴¹ Tri Astuti, Ribka Shintia Febriarti Bonara, and Marti Dewi Ungkari, *AKUNTANSI KEUANGAN* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

cepat, dalam kurun waktu kurang dari setahun.¹⁴² Aktiva lancar pada BUMDes Kuncup Mekar tercatat sebesar Rp558.101.499 atau sekitar 96,8% dari total aktiva, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan BUMDes Kuncup Mekar berada dalam bentuk aset yang mudah dicairkan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Komponen terbesar dalam aktiva lancar adalah piutang kredit mikro sebesar Rp344.390.000, yang menunjukkan bahwa aktivitas utama BUMDes Kuncup Mekar lebih banyak bergerak pada sektor pembiayaan atau simpan pinjam kepada masyarakat. Selain itu, saldo bank sebesar Rp124.199.292 dan persediaan sebesar Rp54.642.770 juga menunjukkan bahwa BUMDes Kuncup Mekar memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan operasional dan menjaga kelancaran usaha.

- b) Aktiva Tetap (*Fixed Assets*) merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam kurun waktu lebih dari setahun.¹⁴³ Sementara itu, aktiva tetap yang dimiliki BUMDes Kuncup Mekar sebesar Rp18.394.163 atau sekitar 3,2% dari total aktiva. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan aktiva lancar, yang menunjukkan bahwa BUMDes Kuncup Mekar lebih berorientasi pada perputaran dana usaha daripada investasi pada aset tetap. Aktiva tetap terdiri dari biaya dibayar dimuka sebesar Rp18.000.000 dan nilai buku inventaris sebesar Rp394.163. Kecilnya proporsi aktiva tetap menunjukkan bahwa penggunaan aset jangka panjang masih terbatas dan difokuskan hanya untuk mendukung operasional usaha. Secara keseluruhan, struktur aktiva BUMDes Kuncup Mekar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik dengan dominasi aset lancar, sehingga cukup fleksibel dalam menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendek.

¹⁴² Novie Dhanie, *BUKU PINTAR AKUNTANSI DASAR Teori Dan Penerapannya* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023).

¹⁴³ Jumingan, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019).

2. Pasiva/utang/kewajiban merupakan utang perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu atau tuntutan (*klaim*) seseorang atau kelompok perorangan terhadap kekayaan perusahaan.¹⁴⁴ Kewajiban digolongkan dengan urutan berdasarkan jangka waktu pelunasan. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Berdasarkan tabel 4.3 neraca BUMDes Kuncup Mekar per 31 Desember 2025, pada sisi pasiva dapat diketahui bahwa total pasiva BUMDes Kuncup Mekar sebesar Rp576.495.662 yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Adapun pos-pos akun yang terdapat pada pasiva di BUMDes Kuncup Mekar terdiri dari:
 - a) Utang lancar adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Utang lancar pada BUMDes Kuncup Mekar tercatat sebesar Rp14.980.482 atau sekitar 2,6% dari total pasiva. Nilai ini menunjukkan bahwa kewajiban jangka pendek BUMDes Kuncup Mekar relatif kecil. Komponen utang lancar terbesar berasal dari utang gaji/upah karyawan sebesar Rp11.534.200, yang menunjukkan adanya kewajiban operasional yang harus diselesaikan dalam jangka pendek. Selain itu, terdapat dana kehormatan dan operasional sebesar Rp3.178.428 serta dana sosial sebesar Rp267.854 sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek lainnya. Rendahnya nilai utang lancar menunjukkan bahwa beban kewajiban BUMDes Kuncup Mekar masih dalam kondisi yang terkendali.
 - b) Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Pada neraca BUMDes Kuncup Mekar tidak terdapat utang jangka panjang, yang menunjukkan bahwa BUMDes Kuncup Mekar tidak memiliki kewajiban pembayaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Kondisi ini menjadi indikator positif

¹⁴⁴ Irmah Halimah Bachtiar Nurfadila, *AKUNTANSI DASAR BUKU PINTAR UNTUK PEMULA* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019).

karena BUMDes Kuncup Mekar tidak memiliki beban cicilan atau pinjaman jangka panjang yang dapat mengurangi stabilitas keuangan di masa mendatang.

- c) Ekuitas atau Modal merupakan kekayaan dari pemilik atas sebagian harta perusahaan, yaitu selisih antara total aset dengan kewajiban/utang perusahaan. Sementara itu, pada neraca BUMDes Kuncup Mekar bagian terbesar dari pasiva berasal dari modal yang mencapai Rp561.782.034 atau sekitar 97,4% dari total pasiva. Modal tersebut terdiri dari modal desa sebesar Rp499.516.306, laba ditahan sebesar Rp19.559.539, dan laba berjalan sebesar Rp42.706.189. Besarnya proporsi modal menunjukkan bahwa struktur pendanaan BUMDes Kuncup Mekar lebih dominan berasal dari modal sendiri dibandingkan utang. Hal ini mencerminkan kondisi keuangan yang sehat, tingkat solvabilitas yang baik, serta kemampuan BUMDes Kuncup Mekar dalam menjalankan kegiatan usaha secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap pinjaman atau utang.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas (*cash flow statement*) adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas adalah untuk mengevaluasi struktur keuangan perusahaan, likuiditas, solvabilitas, serta aktiva bersih.¹⁴⁵ Arus kas dalam laporan keuangan diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pembiayaan, untuk menunjukkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari kegiatan utama usaha yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

¹⁴⁵ Toto Prihadi, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Konsep Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

dalam menjalankan operasional sehari-hari. Aktivitas operasional mencakup seluruh transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa serta pengeluaran kas untuk pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi memiliki peran penting karena menunjukkan kemampuan usaha dalam menghasilkan kas yang cukup untuk menjaga likuiditas serta membiayai kegiatan operasional secara berkelanjutan.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lainnya yang digunakan untuk mendukung perkembangan usaha. Aktivitas investasi mencakup transaksi seperti pembelian atau penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang tidak ditujukan untuk diperdagangkan. Selain itu, aktivitas investasi juga meliputi pemberian pinjaman kepada pihak lain beserta penerimaan kembali atas pinjaman tersebut.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah arus kas yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan pengembalian dana yang bersumber dari pemilik modal maupun pihak kreditur untuk mendukung pendanaan usaha. Aktivitas pembiayaan mencakup transaksi yang berhubungan dengan utang jangka panjang dan ekuitas atau modal, seperti penerimaan modal, pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali kewajiban tersebut. Arus kas dari aktivitas pembiayaan menunjukkan bagaimana usaha memperoleh sumber dana untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Adapun pembayaran utang lancar tidak termasuk dalam aktivitas pembiayaan, melainkan diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Alexander Hery, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (Bandung: Yrama Widya, 2025).

2. Kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BUMDes Kuncup Mekar tentu dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi. Namun, dalam proses penyusunannya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, maupun sistem pencatatan keuangan yang digunakan. Kendala-kendala tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas dan ketepatan penyajian laporan keuangan BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian, tidak adanya latar belakang pendidikan akuntansi pada pengelola BUMDes Kuncup Mekar menjadi faktor utama yang menyebabkan laporan keuangan yang disusun masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini tentunya berdampak pada kualitas informasi keuangan yang dihasilkan serta tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan keuangan BUMDes seharusnya disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa, yang menegaskan bahwa BUMDes perlu menyusun laporan keuangan secara tertib, sistematis, dan sesuai pedoman yang telah ditetapkan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), laporan keuangan harus disusun secara sederhana namun tetap memenuhi

prinsip penyajian yang wajar agar dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal kemampuan dan pemahaman akuntansi, menjadi faktor utama yang menghambat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada proses pencatatan, tetapi juga pada tahap penyusunan dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan belum disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar masih perlu ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa adanya kemampuan yang memadai di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan yang baik akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pengurus BUMDes dalam bidang akuntansi menjadi hal yang penting agar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih optimal, sehingga mampu mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Dengan demikian, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pada BUMDes Kuncup Mekar menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dalam SAK EMKM dan Permendesa PDTT tersebut belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi menjadi hal yang sangat penting agar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih baik, sistematis, serta sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

BUMDes Kuncup Mekar telah mengalami perkembangan dalam sistem pencatatan keuangan, yaitu dari pencatatan manual menuju penggunaan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan)

sejak tahun 2024. Perubahan ini merupakan langkah yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstruktur. Peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis aplikasi juga menunjukkan adanya kesadaran dari pengelola BUMDes akan pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Namun demikian, meskipun penggunaan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pengurus BUMDes. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan para informan yang menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap belajar dan belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis aplikasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Selain itu, peralihan dari pencatatan manual ke sistem aplikasi juga memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Pengurus BUMDes yang sebelumnya terbiasa melakukan pencatatan secara sederhana harus menyesuaikan diri dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi. Tanpa adanya pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, proses adaptasi ini dapat menjadi kendala dalam optimalisasi penggunaan aplikasi. Akibatnya, meskipun aplikasi telah tersedia, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Penggunaan aplikasi dalam pencatatan keuangan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perubahan alat, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Aplikasi akuntansi seperti PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) pada dasarnya dirancang untuk membantu menghasilkan laporan

keuangan yang lebih akurat, sistematis, dan sesuai dengan standar akuntansi. Namun, tanpa pemahaman yang cukup dari penggunaanya, maka manfaat dari penggunaan aplikasi tersebut tidak dapat dirasakan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) di BUMDes Kuncup Mekar merupakan langkah awal yang baik dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, agar penggunaan aplikasi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih aplikatif serta pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, dukungan sarana dan sistem yang memadai juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan secara efektif. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi, maka diharapkan BUMDes Kuncup Mekar dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Solusi dalam menghadapi kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

Dalam menghadapi berbagai kendala dalam penyajian laporan keuangan, BUMDes Kuncup Mekar perlu melakukan berbagai upaya perbaikan agar laporan keuangan yang disusun dapat sesuai dengan standar akuntansi. Solusi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem pencatatan, tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi, serta pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan BUMDes mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian, solusi dalam menghadapi kendala penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar terletak pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih

efektif, pemerataan pelatihan kepada seluruh pengurus, serta adanya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa dan pihak pengawas juga memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang bersifat satu kali tanpa adanya tindak lanjut belum mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aplikatif dan berkesinambungan agar pengurus dapat memahami dan menerapkan standar akuntansi secara lebih baik. Dengan adanya pendampingan yang rutin, pengurus BUMDes Kuncup Mekar diharapkan dapat lebih mudah mengatasi kesulitan dalam pencatatan serta penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, apabila solusi tersebut dapat diterapkan secara optimal, maka diharapkan BUMDes Kuncup Mekar mampu menyusun laporan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pengelolaan BUMDes ke depan.

Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Kuncup Mekar dalam mengatasi kendala pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah ada, yaitu melalui keikutsertaan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Namun, pelaksanaan bimtek tersebut belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga pemahaman pengurus terhadap penyusunan laporan keuangan masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimtek yang tidak berkesinambungan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kurangnya frekuensi dan pengulangan materi menyebabkan pengurus masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan bimtek yang lebih terjadwal dan berkelanjutan agar pemahaman pengurus dapat meningkat secara bertahap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang telah

dilakukan sudah mengarah pada perbaikan, namun masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan bimtek. Apabila hal tersebut dapat dilakukan secara optimal, maka diharapkan kualitas pencatatan dan penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar dapat menjadi lebih baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, pengelolaan keuangan BUMDes harus didukung oleh kapasitas pengurus yang memadai agar laporan keuangan dapat disusun secara tepat, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah desa telah memberikan dukungan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pengurus BUMDes Kuncup Mekar. Namun, pelaksanaan dukungan tersebut belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga belum mampu memberikan dampak yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang lebih terstruktur, terjadwal, dan berkelanjutan agar pengurus dapat memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan secara lebih baik. Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis akan lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dibandingkan pelatihan yang dilakukan secara tidak teratur. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan BUMDes dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

4. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dan penyajian laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar berjalan secara transparan dan akuntabel. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, BPD bertugas memantau serta mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan tertib administrasi, mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan keuangan, serta mewujudkan pengelolaan BUMDes yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar telah mengarah pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan yang dilakukan oleh bendahara, pelaporan yang disampaikan kepada direktur dan BPD, serta pengawasan yang dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan laporan dan forum rapat desa. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan memberikan dampak yang lebih besar dalam mendorong pengurus untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara pengurus dan pihak pengawas juga perlu terus dipertahankan agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menekankan bahwa setiap pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. Selain itu, transparansi dalam penyampaian laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam tata kelola keuangan yang baik. Dengan adanya pengawasan yang aktif dari BPD serta

keterbukaan dari pengurus BUMDes, maka pengelolaan keuangan BUMDes Kuncup Mekar diharapkan dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

BPD telah melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan BUMDes, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Evaluasi yang dilakukan masih bergantung pada waktu penyampaian laporan oleh pengurus, sehingga frekuensi pengawasan menjadi tidak konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi pengawasan telah berjalan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Dengan adanya jadwal evaluasi yang lebih terstruktur dan dilakukan secara berkala, maka pengawasan terhadap laporan keuangan BUMDes dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting agar setiap kesalahan atau kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan dapat segera diketahui dan diperbaiki, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terus meningkat.

Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, fungsi pengawasan juga sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan proses untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, serta melakukan tindakan perbaikan apabila diperlukan.¹⁴⁷ Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur akan lebih efektif dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan BUMDes dalam pengawasan laporan keuangan telah berjalan melalui forum rapat desa serta

¹⁴⁷ George R. Terry and Lw. Rue, *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

komunikasi langsung antar pihak. Koordinasi tersebut bersifat partisipatif karena melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Namun demikian, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi yang lebih terjadwal dan sistematis agar proses pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka setiap informasi terkait laporan keuangan dapat disampaikan secara jelas, serta setiap permasalahan yang muncul dapat segera ditindaklanjuti.

Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Terry yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan usaha untuk menyelaraskan berbagai kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan BUMDes akan sangat berpengaruh dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tingkat pemahaman pengelola dan pengawas terhadap standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar masih tergolong rendah. Kondisi ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, di mana laporan tersebut masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kondisi ini juga berpotensi menyebabkan laporan keuangan kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Keterbatasan pemahaman ini juga memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD, karena proses evaluasi yang dilakukan belum mampu menilai kesesuaian laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kapasitas baik bagi pengelola maupun pihak pengawas melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, agar pemahaman terhadap standar akuntansi dapat meningkat dan dapat diterapkan dalam praktik penyusunan laporan

keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik memerlukan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pengawasan yang efektif harus didukung oleh pemahaman yang memadai agar proses evaluasi dapat dilakukan secara tepat. Dengan demikian, peningkatan pemahaman terhadap standar akuntansi menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes Kuncup Mekar, terutama dalam hal keterbukaan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, kontribusi tersebut masih terbatas dan belum optimal, khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah memberikan kontribusi, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas baik bagi pengurus maupun pihak pengawas, serta pelaksanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar kontribusi yang diberikan dapat lebih maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak hanya menekankan pada penyampaian laporan, tetapi juga pada kualitas laporan yang disajikan. Selain itu, pengawasan yang efektif harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kinerja. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan secara optimal akan berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes Kuncup Mekar masih menggunakan sistem pencatatan sederhana (*single entry*) dengan basis kas (*cash basis*), yaitu pencatatan yang berfokus pada kas masuk dan kas keluar. Dalam proses pencatatannya, BUMDes Kuncup Mekar telah menggunakan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, BUMDes Kuncup Mekar juga telah menyusun beberapa jenis laporan keuangan seperti laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Namun demikian, penyajian laporan keuangan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku karena proses pencatatannya belum melalui tahapan akuntansi yang lengkap seperti jurnal umum dan buku besar secara sistematis.
2. Kendala yang dihadapi BUMDes Kuncup Mekar dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi, rendahnya pemahaman pengurus terhadap prosedur pencatatan akuntansi, serta belum diterapkannya sistem pencatatan akuntansi secara lengkap seperti jurnal umum dan buku besar. Meskipun BUMDes Kuncup Mekar telah menggunakan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan keuangan, penerapannya masih belum optimal karena pengurus masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran dalam penggunaan sistem tersebut. Kondisi ini menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan masih perlu ditingkatkan agar informasi keuangan yang

disajikan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar yaitu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), dan pendampingan di bidang akuntansi serta pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, BUMDes Kuncup Mekar juga telah menggunakan aplikasi PPAK (Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan) sebagai alat bantu dalam pencatatan dan pelaporan keuangan untuk mendukung proses pencatatan agar lebih rapi dan sistematis. Namun demikian, penerapan sistem tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar penggunaan aplikasi dapat berjalan lebih optimal serta kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
4. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyajian laporan keuangan BUMDes Kuncup Mekar telah dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penerimaan laporan pertanggungjawaban dari pengurus BUMDes. Namun, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman mengenai sistem akuntansi dan laporan keuangan. Meskipun demikian, BPD tetap berupaya menjalankan fungsi pengawasan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes kepada masyarakat dan pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi sistem pencatatan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BUMDes Kuncup Mekar diharapkan dapat meningkatkan penerapan sistem pencatatan akuntansi yang lebih sistematis dan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi lebih lengkap, akurat, dan mudah dipahami.

2. Pengurus BUMDes Kuncup Mekar diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman di bidang akuntansi melalui pelatihan atau pendampingan terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan agar proses pencatatan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
3. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan yang telah diterapkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal serta didukung dengan penerapan siklus akuntansi yang lebih lengkap, seperti penggunaan jurnal dan buku besar, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.
4. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian terkait sistem pencatatan akuntansi pada BUMDes dengan pembahasan yang lebih mendalam mengenai penerapan standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPKP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Siskeudes*. Jakarta: BPKP, 2022.
- Adrian, Radiansyah, Fithriah Napu, Khas Sukma Mulya, and Evi Martaseli. *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Di Berbagai Sektor*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, and Mia Amalia. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Alifiulahtin, Utaminingsih, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. *Feminisasi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang: UB Press, 2020.
- Ana, Sopanah, Reny Kurniwati, and Dwi Anggarani. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Surabaya: Sconpindo Media Pustaka, 2023.
- Andayani, Wuryan, Noval Adib, Moh. Erfan Arif, Sri Luna Murdianingrum, Sri Wahyuni, Indrayani, and Rika Nur Widiastutik. *Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Pilar Keberhasilan Bumdes*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aris, Nur Faizah. "Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pada Laporan Keuangan PT. Niaga Nusa Abadi Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)." IAIN Parepare, 2023.
- Astuti, Tri, Ribka Shintia Febriarti Bonara, and Marti Dewi Ungkari. *AKUNTANSI KEUANGAN*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Azlansyah. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Danau Indah Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Bustaman, Direktur BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.
- Cahaya, Azwari Peny, Ayke Nuraliati, Muhammad Ali, and Helisia Krisdayanti.

- Akuntansi Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Conrad, Hendrarto. *Membangun Ekonomi Berkeadilan Di Desa Melalui BUMDes Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020.
- Danial, Pengawas BPD BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.
- Desna, Aromatic, Aprih Santoso, Yulia Ningsih, and Nazirwan. *Membangun Desa Dengan Revolusi Digital*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2024.
- Dhanie, Novie. *BUKU PINTAR AKUNTANSI DASAR Teori Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Efendi, M. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Barokah Di Desa Pekantua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.” Universitas Islam Riau, 2020.
- Eka, Prasetya. *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.
- Elih, Yuliah. “Implementasi Kebijakan Pendidikan.” *Jurnal At-Tadbir* 30, no. 2 (2020): 129–53.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, and Rasdianto. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Fitriani, Desti, Amirul Shah Md Shahbudin, and Elvia R. Shauki. “Exploring BUMDES Accountability: Balancing Expectations and Reality.” *Cogent Business and Management* 11, no. 1 (2024).
- Gani Wardana, Allan Fatchan. “Analisis Kesesuaian Pengaturan Badan Usaha Milik Desa Dengan Nilai-Nilai Pancasila.” *Jurnal Al-Wasath* 2, no. 2 (2021): 63–74.
- Gita, Elvira Jessica, Suheriyatmono, and Yuliana. *Teori Akuntansi*. Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025.
- Gustiah, Sekretaris BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28 Februari 2026.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Hadi, Syamsul, Soetriono, Sri Subekti, and Joni Murti Mulyo Aji. *PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR: Strategi Pengembangan Badan Usaha*

- Milik Desa (BUMDes)*. Yogyakarta: StarDigital Publishing, 2025.
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Harry, Subagjo, Nelly Ervina, Desti Monika Uli, and Nicky Handayani. *Konsep Dasar Akuntansi Keuangan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2025.
- Hartoto, Arifah Fibri Andriani, and Nina Andriana. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (TEORI DAN PRAKTIK)*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Hasibuan, Zainal Efendi, Surianti Siregar, Armila Sari Lubis, and Dahlan Daulay. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kepustakaan, Dan PTK*. Malang: AE Publishing, 2024.
- Haura Hanifah. "Landasan Teori Penelitian Relevan." *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. April (2025): 391–404.
- Hendrarto, Condrad. *MEMBANGUN EKONOMI BERKEADILAN DI DESA Melalui BUMDes Syariah*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020.
- Hermawan, Sigit, and Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015.
- Hery. *Siklus Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- Hery, Alexander. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Bandung: Yrama Widya, 2025.

- Hutabaalian, Adelima, Hendrik ES Samosir, and Ardin Dolok Saribu. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maduma Desa Palipi Kabupaten Samosir." *Jurnal Minfo Polgan* 13, no. 2 (2024): 1316–30.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2022.
- Jovan, Febriantoko. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2024.
- Jumingan. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Khotimah, Umami Khusnul. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa BUMDes Beringin Jaya Kecamatan Enok." Universitas Islam Riau, 2021.
- Kusumastuti, Sri Yani, Annisa Fitri Anggraeni, Andi Rustam, and Dona Elvia Desi. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Lestari, Dheri Febiyani, Eza Gusti Anugerah, Tarinih, and Rifqa Ayu Dasila. *AKUNTANSI BIAYA*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2025.
- Lestari, Heni Dwi, Shinta Widyastuti, Ilham Ramadhan Ersyafdi, and Andi Dewi Angreyani. *AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- M, Amir. *Penguatan BUMDES Pilar Perekonomian Desa Terpencil*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Made, Darsana I, Sutarni, Alfriadi Dwi Atmoko, and Risa Wahyuni. *Pengantar Akuntansi*. Bandung: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.
- Mahsun, Mohamad. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardiasmo. *OTONOMI & MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Maulana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, and Alfiyyah Agussalim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Widina Media Utama, 2024.
- Ningtiyas, Jilma Dewi Ayu. "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK-

- EMKM) (Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan).” *Riset & Jurnal Akuntansi* 2, no. 1 (2017): 11–17.
- Nugroho, Riant, and Firre An Suprpto. *Badan Usaha Milik Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2021.
- Nuraini, Ani. *MANAJEMEN KEUANGAN: PRINSIP & KEBIJAKAN*. Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Nurfadila, Irmah Halimah Bachtiar. *AKUNTANSI DASAR BUKU PINTAR UNTUK PEMULA*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- Nurhayati, Apriyanto, Jabal Ahsan, and Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktif)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nurhayati, Sri, Fifian Permata Sari, Loso Judijanto, Muhammad Zainal Fanani, Silas Sudarman, and Helmi Haris. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Tesis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Nurniati Arifin, Bendahara BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 27 Februari 2026.
- Nurrisa, Fahriana, Dina Hermina, and Norlaila. “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP).” *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.
- Oktaviyah, Nurafni, Tarinih, and Yulia Yunita Yusuf. *TEORI AKUNTANSI Konsep, Regulasi, Dan Isu Kontemporer*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2026.
- Prasetya, Eka. *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.
- Prihadi, Toto. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Putra, Ivan Gumilar Sambas, H. Azhar Affandi, Laely Purnamasari, and Denok Sunarsi. *Analisis Laporan Keuangan*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Putri, Yayang. “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Hikmah Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.” Universitas Islam Riau, 2022.

- Rahman, Muhammad Haristo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: CV. Gita Lentera, 2025.
- Rambu Ana, Angelina Trimurti, and Linda Lomi Ga. “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK).” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 62–72.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rinaldi, Muhammad, Rahyuni Rahayu, Ilham, and Harfiani. *PENGANTAR AKUNTANSI (Pendekatan Siklus Akuntansi)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rosini, Iin. *Metode Penelitian Akuntansi Kuantitatif Dan Kualitatif*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Rudi Tompong, Komisaris/Kepala Desa BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Wawancara pada 28
- Slamer, Rahardjo Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.
- Sopannah, Ana, Reny Kurniawati, and Dwi Anggarani. *PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) BERBASIS KEARIFAN LOKAL*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Sufyati, Hamdan Firmansyah, Derri Benarli, Tia Ernawati, Stefani Lily Indarto, Amalia Indah Fitriana, and Kusuma Wijaya. *Analisis Laporan Keuangan*. Cirebon: Insania, 2021.
- Sugiri, Slamet, and Bogat Agus Riyono. *AKUNTANSI Pengantar 1*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Desa: Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Untuk Pemula Dan Orang Awam*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

- Sujarweni, Wiratna. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Terry, George R., and Lw. Rue. *DASAR-DASAR MANAJEMEN*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru, 2002.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Wahyudi, Helmi, Yusri Hazmi, Muammar Qadafi, and M. Akbar Wianda. "Sistem Informasi Akuntansi Accounting Information System." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif* 5, no. 3 (2024).
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Wulandaru, Diah Retno, Anggraeni Pranandari, Zaqiah Vivi, and Syafika Dhea Taqiya Ramadhani. *Kepemimpinan Transformasional Menuju Era Keberlanjutan*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Zamzami, Faiz, Nabella Duta Nusa, and Ihda Arifin Faiz. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, and Rahmawati. "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 1–22.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307

INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURFADILA
NIM : 2220203862202015
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN
AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) KUNCUP MEKAR DESA RIJANG
PANUA, KABUPATEN SIDRAP

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan di BUMDes Kuncup Mekar dalam mencatat transaksi keuangan sehari-hari?
2. Metode pencatatan apa yang digunakan dalam pembukuan BUMDes (misalnya pencatatan manual atau berbasis aplikasi)?
3. Metode pencatatan akuntansi apa yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, apakah menggunakan basis kas (*cash basis*) atau basis akrual (*accrual basis*)?
4. Apakah dalam pencatatan keuangan BUMDes sudah menggunakan sistem tertentu, seperti *single entry* atau *double entry*? Mengapa sistem tersebut dipilih?
5. Jenis laporan keuangan apa saja yang disusun oleh BUMDes Kuncup Mekar dalam pengelolaan keuangannya?

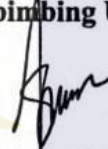
6. Sejauh mana anda mengetahui adanya system pencatatan dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh BUMDes Kuncup Mekar?
7. Apa saja kendala yang dihadapi BUMDes Kuncup Mekar dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi?
8. Apakah pengurus BUMDes mengalami kesulitan dalam memahami atau menerapkan standar akuntansi dalam pencatatan keuangan?
9. Apakah terdapat keterbatasan sumber daya manusia atau kemampuan pengurus dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan?
10. Apakah BUMDes telah menggunakan sistem atau aplikasi tertentu dalam pencatatan keuangan, atau masih menggunakan pencatatan secara manual?
11. Bagaimana pengaruh keterbatasan sarana, pelatihan, atau pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan BUMDes?
12. Menurut Anda, faktor apa yang paling menjadi kendala dalam menyajikan laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan standar akuntansi?
13. Menurut Anda, solusi apa yang paling dibutuhkan agar laporan keuangan BUMDes dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku?
14. Upaya atau strategi apa yang telah dilakukan BUMDes untuk mengatasi kendala dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan?
15. Apakah terdapat rencana pengembangan, seperti pelatihan atau pendampingan, untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan BUMDes?
16. Menurut Anda, solusi apa yang paling efektif agar BUMDes dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi secara berkelanjutan?
17. Menurut Anda, solusi apa yang paling dibutuhkan agar sistem administrasi dan dokumentasi BUMDes dapat mendukung penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi?

18. Apakah pemerintah desa menyediakan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, atau pendampingan dalam pengelolaan keuangan BUMDes?
19. Bagaimana mekanisme dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penyajian laporan keuangan BUMDes?
20. Seberapa sering BPD melakukan evaluasi atau penelaahan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh BUMDes?
21. Bagaimana tindak lanjut BPD apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam laporan keuangan BUMDes?
22. Bagaimana bentuk koordinasi antara pemerintah desa, BPD, dan BUMDes dalam melakukan pengawasan terhadap penyajian laporan keuangan?
23. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh BPD berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes?

Parepare, 15 Januari 2026

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Ira Sahara, M. Ak

NIP. 19901220 201903 2016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURFADILA
N I M : 2220203862202015
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KUNCUP MEKAR DESA RIAJNG
PANUA, KECAMATAN KULO, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Telah diganti dengan judul baru:

IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KUNCUP MEKAR DESA RIJANG
PANUA, KABUPATEN SIDRAP

dengan alasan / dasar:

Perubahan judul dilakukan untuk pengederhanaan penulisan lokasi penelitian
tanpa mengubah substansi penelitian.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 9 Juni 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ira Sahara, M.Ak

Mengetahui
Dekan,

Din Purba S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-189/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

02 Februari 2026

Yth. BUPATI SIDRAP
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURFADILA
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. SIDENRENG RAPPANG, 18 Mei 2004
NIM : 2220203862202015
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari`ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.KULO, DESA RIJANG PANUA, KEC.KULO, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDRAP dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KUNCUP MEKAR DESA RIJANG PANUA, KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Pebruari 2026 sampai dengan tanggal 09 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 142/IP/DPMPTSP/2/2026

- DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NURFADILA** Tanggal **20-02-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
Nomor **B-189/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/202** Tanggal **02-02-2026**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA : **NURFADILA**

ALAMAT : **Jl. Kulo Desa Rijang Panua Kec. Kulo**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap**

LOKASI PENELITIAN : **Desa Rijang Panua Kec. Kulo**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **09 Pebruari 2026 s.d 09 Maret 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 20-02-2026



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

Desa Rijang Panua Kec. Kulo



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA RIJANG PANUA
Alamat: Jl. KUD No. 1 Desa Rijang Panua Telp. 0421 3683888 Kode Pos 91653 kode Pos 91653
E-mail. desarijangpanuakulo@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 32 /Sket/DRP/II/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : RUDI TOMPANG

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : NURFADILA

NIM : 2220203862202015

Jurusan / Prog. Studi : Akuntansi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Untuk tersebut di atas benar-benar Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare dan akan melakukan penelitian di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, Dimana yang di teliti dengan judul **"Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua Kabupaten Sidrap"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rijang Panua, 20 Februari 2026

Kepala Desa Rijang Panua





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DESA RIJANG PANUA
KECAMATAN KULO

JALAN KUD NO. 1 DESA RIJANG PANUA KODE POS 91653
website. <https://rijangpanua.id> e-mail. desarijangpanuakulo@gmail.com

Nomor : 35/Sket/DRP/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
NURFADILA
Di
tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyatakan bahwa Saudari dari **Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare** telah melakukan penelitian di Desa Rijang Panua dengan judul penelitian:

"Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua Kabupaten Sidrap"

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan izin penelitian yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan rentang waktu 18 Februari 2026 s.d. 06 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rijang Panua, 06 Maret 2026
Kepala Desa



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI TOMBAH
Tempat/Tanggal lahir : TELANG 07 APRIL 1981
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA DESA

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 28 Februari 2026



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUSTAMANI.

Tempat/Tanggal lahir : TELANG TELANG 06-11-1974.

Agama : ISLAM.

Pekerjaan/Jabatan : DIREKTUR BUMDES.

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 28 Februari 2026



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *DANIAL*

Tempat/Tanggal lahir : *31-12-1965*

Agama : *ISLAM*

Pekerjaan/Jabatan : *B.PD.*

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *20* Februari 2026



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTAH

Tempat/Tanggal lahir : TELANG 16-8-1982

Agama : ISLAM

Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS BUMDES

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 28 Februari 2026



GUSTAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NURNIATI ARIFIN*

Tempat/Tanggal lahir : *ATAKKAE, 02/12/1973*

Agama : *ISLAM*

Pekerjaan/Jabatan : *BENDAHARA BUMDES*

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurfadila yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, *27 Februari* 2026


(*NURNIATI ARIFIN...*)

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Rudi Tompong selaku Komisaris/Kepala Desa
BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua



Wawancara dengan Bapak Danial selaku Pengawas BPD
BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua



Wawancara dengan Bapak Bustaman selaku Direktur
BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua



Wawancara dengan Ibu Gustiah selaku Sekretaris
BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua



Wawancara dengan Ibu Nurniati Arifin selaku Bendahara
BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua

BUMDES KUNCUP MEKAR
LAPORAN RUGI/LABA
PERIODE Desember 2025

Desa : Rijang Panua
 Kec. : Kulo
 Kab. : Sidrap

		BULAN LALU	BULAN INI	KUMULATIF
		Rp	Rp	Rp
4	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Operasional			
4.1.1	Unit Jasa Keuangan	52.692.000	4.169.000	56.861.000
4.1.2	Unit Usaha Dagang	30.339.000	1.000.000	31.339.000
4.1.3	Unit Usaha Bioflok	0	0	0
4.1.5	Usaha Lain	0	0	0
	Jumlah pendapatan Operasional	83.031.000	5.169.000	88.200.000
4.2	Pendapatan Non Operasional			
4.2.1	Bunga Bank	62.868	11.071	73.939
	Jumlah pendapatan Non Operasional	62.868	11.071	73.939
	TOTAL PENDAPATAN	83.093.868	5.180.071	88.273.939
5	BIAYA			
5.1	Biaya Operasional	0	0	0
5.1.1	Honor Karyawan	38.868.100	2.222.700	41.090.800
5.1.2	Administrasi dan Umum	0	0	0
5.1.3	Transport	0	0	0
5.1.4	Sewa Kantor	0	0	0
5.1.5	Penyusutan Inventaris/harta tetap	394.163	0	394.163
5.1.6	Biaya Operasional lain-lain	3.752.000	268.000	4.020.000
	Jumlah biaya Operasional	43.014.263	2.490.700	45.504.963
5.2	Biaya Non Operasional			
5.2.1	Pajak dan adm bank	56.573	6.214	62.787
	Jumlah Biaya Non Operasional	56.573	6.214	62.787
	TOTAL BIAYA	43.070.836	2.496.914	45.567.750
	LABA / (RUGI)	40.023.032	2.683.157	42.706.189

Rijang Panua, 31 Desember 2025

Diketahui dan disetujui oleh
 Ketua Bumdes



Dibuat oleh:
 Bendahara BUMDES

NURNIATI ARIFIN

LAPORAN PERUBAHAN MODAL/EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2025

Nomor Urut	Uraian	2025
1	PENYERTAAN MODAL	
2		
3	Penyertaan Modal Desa awal	Rp 499.516.306
4	Penyertaan Modal Masyarakat Awal	Rp -
5	Penambahan Investasi periode berjalan :	Rp -
6	Penyertaan Modal Desa	Rp -
7	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -
8	Penyertaan Modal Akhir	Rp 499.516.306
9	SALDO LABA	
10	Saldo Laba awal:	
11	Saldo Laba ditahan	Rp 14.645.366
12	Saldo Laba tahun lalu/dividen	Rp 4.914.174
13	Laba Rugi Periode berjalan	Rp 42.706.189
14	Bagi Hasil Penyertaan :	
15	Bagi hasil penyertaan modal desa	Rp 8.541.238
16	Bagi hasil penyertaan modal Masyarakat	Rp -
17	Saldo Laba Akhir	Rp 53.724.491
18	MODAL DONASI/SUMBANGAN	
19	Modal Donasi/ sumbangan	Rp -
20		Rp -
22	EKUITAS AKHIR	Rp 553.240.797

Diketahui dan disetujui oleh
Ketua Bumdes



Rijang Panua, 31 Desember 2025
Dibuat oleh
Bendahara Bumdes


NURNIATI ARIFIN



DESA : Rijang Panua
Kecamatan : Kulo
Kabupaten : Sidrap
Propinsi : Sulawesi Selatan

Rijang Panua, 31 Desember 2025

Dibuat oleh :


Nurmiati Arifin
Bendahara BUMDES

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2025

Nomor Urut	Uraian	2025
1		
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
2	Arus Kas Masuk	
3	Penerimaan Kas dari penjualan barang dagangan	Rp 311.025.000
4	Penerimaan Kas dari bunga rekening bank	Rp 73.939
5	Penerimaan Kas dari Angsuran pinjaman	Rp 350.721.000
6	Jumlah Arus Kas masuk dari aktivitas operasi	Rp 661.819.939
7	Arus Kas Keluar	
8	Pengeluaran Kas untuk pembayaran ke pemasok barang	-Rp 258.900.000
9	Pengeluaran kas untuk pembayaran gaji /upah pegawai/karyawan	-Rp 41.090.800
10	Pengeluaran kas untuk pembayaran Pajak rekening bank	-Rp 62.787
11	Pengeluaran kas untuk pembayaran	Rp -
12	Pengeluaran kas untuk Pinjaman	-Rp 302.500.000
13	Pengeluaran kas untuk pembayaran beban -beban lain	-Rp 4.020.000
14	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi	-Rp 606.573.587
15	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp 55.246.352
16		
17	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
18	Arus Kas Masuk	
19	Penerimaan Kas dari penjualan Aset Tetap	Rp -
20	Penerimaan Kas dari penjualan Investasi	Rp -
22	Arus Kas Keluar	
23	Pengeluaran Kas untuk pembelian Aset Tetap	Rp -
24	Pengeluaran Kas untuk pembelian Investasi	Rp -
25	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas Investasi	Rp -
26		
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
28	Arus Kas Masuk	
29	Penerimaan Kas dari penyertaan modal desa	Rp -
30	Penerimaan Kas dari penyertaan Masyarakat	Rp -
31	Penerimaan Kas dari Donasi /Sumbangan	Rp -
32	Penerimaan Kas dari Utang jangka Panjang	Rp -
33	Jumlah Arus Kas masuk dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
34	Arus Kas Keluar	
35	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal desa	Rp -
36	Pembayaran bagi hasil penyertaan modal Masyarakat	Rp -
37	Pembayaran Pokok utang jangka panjang	Rp -
38	Jumlah Arus Kas Keluar dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
39	Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	Rp -
40		
41	Kenaikan (Penurunan)Kas	Rp 55.246.352
42	Saldo Kas Awal Tahun	Rp 93.946.677
43	Saldo Kas Akhir Tahun	Rp 156.068.729

Diketahui dan disetujui oleh
Ketua Bumdes

Rijang Panua, 31 Desember 2025

Dibuat oleh
Bendahara Bumdes

NURNIATI ARIFIN

BIODATA PENULIS



NURFADILA Lahir pada tanggal 18 Mei 2004 di Tellang-Tellang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Anak dari pasangan Bapak Muhassir dan Ibu Nurniati. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 1 Rijang Panua lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Panca Rijang lulus pada tahun 2019, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Sidrap dengan mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan MBKM di Kantor Pertahanan Kota Parepare. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT., dengan usaha yang disertai dengan doa dan harapan besar dari keluarga, serta orang terdekat penulis, dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BUMDes Kuncup Mekar Desa Rijang Panua, Kabupaten Sidrap”. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.